



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Lt.19 Gedung BPPT II Jalan MH Thamrin No. 8, Jakarta 10340
Telepon: (021) 3169707 Fax: (021) 3102368
Laman: <http://ristekdikti.go.id>

Nomor	: 0045/E3/LL/2018	16 Januari 2018
Lampiran	: 5 (lima) berkas	
Perihal	: Penerima Pendanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2018	

Yth. 1. Rektor/ Direktur/Ketua Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta
2. Koordinator Kopertis Wilayah I s/d XIV

Sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan nomor 1/E/KPT/2018 tanggal 3 Januari 2018 tentang Penerima Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Tahun 2018, SK Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan nomor 2/E/KPT/2018 tanggal 3 Januari 2018 tentang Penerima Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2018 dan SK Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan nomor 3 tanggal 3 Januari 2018 tentang Penerima Pendanaan Penelitian Tahun 2018, bersama ini kami sampaikan daftar nama penerima pendanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat tahun 2018 sebagaimana terlampir.

Kami informasikan bahwa penerima pendanaan program Penelitian dan Pengabdian Masyarakat tahun 2018 adalah pengusul yang proposalnya dinyatakan lolos seleksi, dan yang bersangkutan atau institusi telah memenuhi kewajiban sebagai berikut:

1. Mengunggah Laporan kemajuan tahun 2015 - 2017;
2. Mengunggah Laporan Akhir tahun 2015 - 2017;
3. Mengunggah Berkas Kelengkapan Seminar Hasil tahun 2015 – 2017;
4. Mengunggah proposal lanjutan: Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk pelaksana *On Going*;
5. Melaksanakan seluruh tahapan seleksi sebagaimana disebutkan dalam Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi Edisi XI untuk skema penelitian desentralisasi Perguruan Tinggi.
6. Tidak memiliki tunggakan dokumen sebagaimana terdapat pada surat nomor 4996/E3.4/LT/2017 tanggal 20 Desember 2017
7. Seorang dosen hanya dapat menjadi ketua di satu judul Pengabdian kepada Masyarakat. Agar segera diusulkan penggantian Ketua kepada anggota oleh Ketua LPPM ke DRPM untuk pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang baru ;
8. Tidak sedang dalam status tugas belajar, baik untuk ketua maupun anggota;
9. Pendanaan penelitian diberikan dengan memperhatikan kuota berdasarkan H-index peneliti.

Berkenaan dengan hal tersebut, DRPM mengucapkan selamat kepada penerima pendanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat tahun 2018. DRPM mengucapkan terimakasih kepada pengusul yang telah berpartisipasi dan apabila nama pengusul tidak tercantum, maka dapat mengusulkan kembali proposal pendanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat untuk pendanaan tahun 2019. Selanjutnya, kami mohon bantuan Saudara untuk menyampaikan informasi di atas kepada penerima pendanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tahun 2018 di Perguruan Tinggi masing-masing.

Kami sampaikan bahwa mekanisme penyaluran dana akan dilakukan melalui kontrak kerja antara DRPM dengan Ketua LP/LPPM/LPM Perguruan Tinggi Negeri Non Badan Hukum dan atau Koordinator Kopertis Wilayah. Untuk maksud tersebut, bersama ini kami kirimkan daftar isian (terlampir) untuk diisi dan mohon segera dikirim melalui email ke dp2mdikti@yahoo.co.id (untuk program Penelitian), dan ppm.dp2m@ristekdikti.go.id (untuk program Pengabdian Masyarakat) paling lambat tanggal 21 Januari 2018.

Khusus untuk Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, informasi lebih lanjut mengenai kontrak akan diberitahukan lebih lanjut melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat masing-masing. Hal-hal lain yang terkait dengan mekanisme penyaluran dana dan pelaksanaan pendanaan akan diinformasikan kemudian melalui laman: <http://simlibtamas.ristekdikti.go.id>

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat

ttd

Ocky Karna Radjasa
NIP 196510291990031001

Tembusan.

1. Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan
2. Ketua LP/LPPM/LPM Perguruan Tinggi
3. Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah I s/d XIV

Lampiran Surat Nomor : 0045/E3/LL/2018

Tanggal : 16 Januari 2018

Tentang : PENERIMAAN PENDANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT DI PERGURUAN TINGGI TAHUN 2018

DAFTAR NON PTN BH

NO	PTN/ KOPERTIS	INSTITUSI	SKEMA	NAMA	JUDUL	STATUS USULAN
1	PTN	Institut Seni Budaya Indonesia Bandung	P3S	ENDAH IRAWAN	EKSPERIMEN ANGKLUNG PENTATONIK MELALUI PEMBUATAN ALAT DAN KARYA MUSIK UNTUK MENUNJANG INDUSTRI KREATIF DI KABUPATEN BANDUNG JAWA BARAT	Lanjutan
2	PTN	Institut Seni Budaya Indonesia Bandung	P3S	MOHAMAD YUSUF WIRADIREDA	PENCIPTAAN MUSIK DAN LAGU SUNDA ISLAMI BERDASARKAN NASKAH PEPELING KARYA ABAH ANOM SURYALAYA DALAM BENTUK KAWIH DAN TEMBANG	Baru
3	PTN	Institut Seni Budaya Indonesia Bandung	PBK	EEN HERDIANI	SEJARAH TARI TOPENG CIREBON DALAM KEMASAN MULTIMEDIA	Lanjutan
4	PTN	Institut Seni Budaya Indonesia Bandung	PBK	NENENG YANTI KHOZANATU L	SISTEM PEWARISAN SENI TRADISI DAN POLITIK IDENTITAS MELALUI PENDIDIKAN, FESTIVAL SENI, DAN PASANGGIRI DI JAWA BARAT	Baru
5	PTN	Institut Seni Budaya Indonesia Bandung	PDD	IMAM SETYOBUDI	Revitalisasi Tradisi Ngalokat Sirah Cai Irung-irung melalui Seni Kejadian di Desa Cihideung (Parongpong, Bandung Barat, Jawa Barat): Telaah Gerakan Sosial Baru Alain Touraine	Baru
6	PTN	Institut Seni Budaya Indonesia Bandung	PDP	DYAH NURHAYATI	KAJIAN ESTETIKA APLIKASI AKSARA JAWA "HANACARAKA" PADA MEDIA KOMUNIKASI VISUAL MODERN	Baru
7	PTN	Institut Seni Budaya Indonesia Bandung	PDP	SAVITRI	Transformasi Bentuk dan Fungsi Produk Tradisional Sunda sebagai Elemen Dekoratif pada Interior Kontemporer	Baru
8	PTN	Institut Seni Budaya Indonesia Bandung	PDP	WURI HANDAYANI	Pedagogi Estetik Berbasis Kearifan Lokal melalui Batik Cianjur bagi Remaja di Kabupaten Cianjur	Baru
9	PTN	Institut Seni Budaya Indonesia Bandung	PDUP	AFRI WITA	Artikulasi Circuit of Culture Sebagai Perangkat Pengetahuan Literasi Tradisi	Lanjutan
10	PTN	Institut Seni Budaya Indonesia Bandung	PSNI	CAHYA	Naskah Sunda Kuno sebagai Sumber Inspirasi Visualisasi Estetik dalam Bentuk Seni Pertunjukan	Lanjutan
11	PTN	Institut Seni Budaya Indonesia Bandung	PSNI	ENOK WARTIKA	PENGEMASAN MODEL KOMUNIKASI BERBASIS MULTIMEDIA DALAM BERKONTRIBUSI MENOPTIMALKAN PROGRAM KONSERVASI DAN REVITALISASI SENI BUDAYA LOKAL INDONESIA DI JAWA BARAT	Baru
12	PTN	Institut Seni Budaya Indonesia Bandung	PSNI	JAENI	REVITALISASI BUDAYA LOKAL6 (ENAM) KABUPATEN/KOTA JAWA BARAT DALAM BENTUK SENI PERTUNJUKAN UNTUK PENGEMBANGAN WISATA DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	Baru
13	PTN	Institut Seni Budaya Indonesia Bandung	PSNI	SUHARNO	KURASI FASHION: Model Bingkai Kurasi pada Jember Fashion Carnival	Lanjutan
14	PTN	Institut Seni Budaya Indonesia Bandung	PSNI	YANTI HERIYAWATI	Pengembangan Kearifan Lokal Budaya Maritim Nusantara melalui Festival Pesisir Utara dan Selatan Jawa Barat	Baru
15	PTN	Institut Seni Budaya Indonesia Bandung	PTUP	YADI MULYADI	INOVASI MUSIK LONGSER TEATER DAERAH JAWA BARAT DENGAN DIGITALISASI GAMELAN	Baru

NO	PTN/ KOPERTIS	INSTITUSI	SKEMA	NAMA	JUDUL	STATUS USULAN
2.564	PTN	Universitas Musamus Merauke	PDP	MARNINA	The Improving English Grammar Using EGRA Method (Exposure, Generalization, Reinforcement, Application) Students of Eight Grade SMP BP Al Munawaroh Merauke	Baru
2.565	PTN	Universitas Musamus Merauke	PDP	MULYADI ALRIANTO TAJUDDIN	PERLINDUNGAN BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM MELALUI PENDEKATAN RESTORATIF JUSTICE (STUDI KASUS ANAK ASLI PAPUA YANG BERKONFLIK HUKUM DI KABUPATEN MERAUKE)	Baru
2.566	PTN	Universitas Musamus Merauke	PDP	NURHENING YUNI EKOWATI	Seleksi Ketahanan Padi (Oryza Sativa L.) Terhadap Cekaman Kekeringan Menggunakan PEG-6000 Dan Uji Daya Tembus Akar Di Kabupaten Merauke	Baru
2.567	PTN	Universitas Musamus Merauke	PDP	RIZA FACHRIZAL	Analisis Kelayakan Usaha Pengeringan Gabah Mekanis Pada UD Jasa Tani Kabupaten Merauke	Baru
2.568	PTN	Universitas Musamus Merauke	PDP	SENDY LELY MERLY	STUDI KELIMPAHAN DAN BAGIAN YANG DAPAT DIMAKAN (BYDD) DARI SIPUT LAUT (GASTROPODA) PADA EKOSISTEM MANGROVE WILAYAH PESISIR LAMPU SATU DAN PAYUM, KABUPATEN MERAUKE	Baru
2.569	PTN	Universitas Musamus Merauke	PDP	SUNARNI	STUDI KEANEKARAGAMAN DAN DISTRIBUSI IKAN GELODOK (Mudskipper) BERKAITAN DENGAN KEBIASAAN MAKAN PADA DAERAH ESTUARI KABUPATEN MERAUKE	Baru
2.570	PTN	Universitas Musamus Merauke	PDP	SUYADI	PENGUJIAN KUAT GESER TANAH LEMPUNG DENGAN BAHAN STABILISASI SEMEN DAN FIBER	Baru
2.571	PTN	Universitas Musamus Merauke	PDP	YASHINTA IRMA PRATAMI HEMATANG	Pemetaan Bangunan Bersejarah sebagai Potensi Pariwisata Menggunakan Sistem Informasi Geografis di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Merauke	Baru
2.572	PTN	Universitas Musamus Merauke	PDP	ZEM SANTO	Pengembangan Senam Baca Hitung (Catung) Bagi Siswa Sekolah Dasar Negeri Sota Perbatasan RI-PNG	Baru
2.573	PTN	Universitas Musamus Merauke	PKPT	MODESTA RANNY MATURBONGS	DISTRIBUSI SPASIAL IKAN DEMERSAL EKONOMIS PENTING DI SUNGAI MARO KETERKAITANNYA DENGAN KONDISI OSEANOGRAFI UNTUK ESTIMASI PEMANFAATAN POTENSI DAN PENGELOLAANNYA	Baru
2.574	PTN	Universitas Musamus Merauke	PKPT	YENNI PINTAULI PASARIBU	Analisis Bioaktivitas Sirup Sarang Semut Tomer (S3T)	Lanjutan
2.575	PTN	Universitas Musamus Merauke	PSNI	ANDRI YONO	DESAIN DAN PERANCANGAN MESIN PEMIPIL KACANG TANAH	Lanjutan
2.576	PTN	Universitas Musamus Merauke	PSNI	DINA FITRI SEPTARINI	PENGEMBANGAN MODEL MANAJEMEN ASET TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MERAUKE	Lanjutan
2.577	PTN	Universitas Musamus Merauke	PSNI	ERNI DWITA SILAMBI	Model Peradilan Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat Adat Papua Di Merauke	Lanjutan
2.578	PTN	Universitas Musamus Merauke	PSNI	HENIE POERWANDAR ASMANINGRUM	PENGEMBANGAN BUKU SUPLEMEN KIMIA BERBASIS KEARIFAN LOKAL SUKU ASMAT PAPUA	Lanjutan
2.579	PTN	Universitas Musamus Merauke	PSNI	MARIA VERONICA IRINE HERDJIONO	Pengembangan Model Pembelajaran Kewirausahaan Berdasarkan Personal Faktor dan Lingkungan	Lanjutan
2.580	PTN	Universitas Musamus Merauke	PSNI	MUCHLIS ALAHUDIN	RANCANG BANGUN GREENHOUSE SKALA RUMAH TANGGA DI MERAUKE	Lanjutan
2.581	PTN	Universitas Negeri Gorontalo	PBK	MUHAMMAD AMIR ARHAM	KEBIJAKAN FISKAL (TRANSFER DANA DESA), KETIMPANGAN DAN KEMISKINAN PERDESAAN DI INDONESIA	Baru



**KONTRAK PENELITIAN
BERBASIS KOMPETENSI
Tahun Anggaran 2018
Nomor : 249/UN47.D/PL/2018**

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum

: Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Gorontalo, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. Dr. Muhammad Amir Arham, M.E

: Dosen Fakultas Ekonomi, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2018 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian Berbasis Kompetensi Tahun Anggaran 2018 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1
Ruang Lingkup Kontrak**

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Berbasis Kompetensi Tahun Anggaran 2018 dengan judul "**Kebijakan Fiskal (Transfer Dana Desa), Ketimpangan dan Kemiskinan Perdesaan di Indonesia**".

**Pasal 2
Dana Penelitian**

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar **Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)** sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2018, tanggal 05 Desember 2017.

Pasal 6
Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :
- a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** :
- a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** seluruh Laporan Hasil Program penelitian;
 - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;

Pasal 7
Laporan Pelaksanaan Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Catatan Harian dan Laporan komprehensif pelaksanaan penelitian ke SIMLITABMAS paling lambat **02 November 2018**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Akhir, capaian hasil, Poster, artikel ilmiah dan profil pada SIMLITABMAS paling lambat **02 November 2018** (bagi penelitian tahun terakhir).
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *Hardcopy* seluruh Laporan Hasil Program penelitian kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat **06 November 2018**.
- (5) Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (3) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Bentuk/ukuran kertas A4;
 - b. Format Font Times New Romans ukuran 12 spasi 1.5
 - c. Di bawah bagian cover ditulis:

Dibiayai oleh:
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2018

Pasal 3

Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana penelitian yaitu $70\% \times \text{Rp. } 150.000.000,- = \text{Rp. } 105.000.000,-$ (*Seratus Lima Juta Rupiah*), yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** membuat dan melengkapi proposal penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan di capai.
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu $30\% \times \text{Rp. } 150.000.000,- = \text{Rp. } 45.000.000,-$ (*Empat Puluh Lima Juta Rupiah*), dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah dokumen ke SIMLITABMAS yaitu Catatan Harian Pelaksanaan Penelitian, Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan paling lambat tanggal 10 September 2018.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut :

Nama	: Amir Arham
Nomor Rekening	: 0388417603
Nama Bank	: BNI

- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4

Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah selama enam bulan yang berakhir pada tanggal 16 November 2018.

Pasal 5

Target Luaran

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian berupa **jurnal nasional (published)**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8

Monitoring dan Evaluasi

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2018 ini sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi eksternal oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 9

Penilaian Luaran

1. Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima oleh peneliti harus disetorkan kembali ke kas negara.

Pasal 10

Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian ini dapat dibenarkan apa bila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 11

Penggantian Ketua Pelaksana

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat(1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 12

Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penelitian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan Kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang apabila tidak dapat dilunasi oleh **PIHAK KEDUA**, akan berdampak pada kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pendanaan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 13

Pembatalan Perjanjian

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 14

Pajak-Pajak

PIHAK KEDUA berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa :

- (1) Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5 %
- (2) Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku

Pasal 15

Peralatan dan/alat Hasil Penelitian

Hasil Pelaksanaan Penelitian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Negeri Gorontalo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 17

Lain-lain

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



[Handwritten signature]

Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum
NIDN : 0009046804

PIHAK KEDUA



METERAI
TEMPEL

DDA87ADF465386954

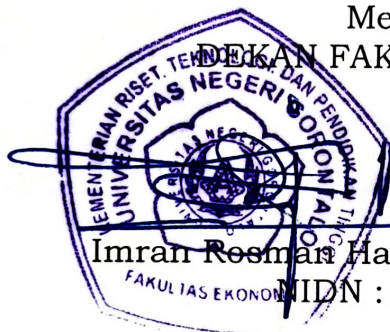
6000
ENAM RIBU RUPIAH

[Handwritten signature]

Dr. Muhammad Amir Arham, M.E
NIDN : 0025077203

Mengetahui

DEKAN FAKULTAS EKONOMI



[Handwritten signature]

Imran Rosman Hambali, S.Pd., S.E., M.SA
NIDN : 0023087004

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

METERAI
TEMPEL

TGL
D595BADF465386959

6000
ENAM RIBU RUPIAH



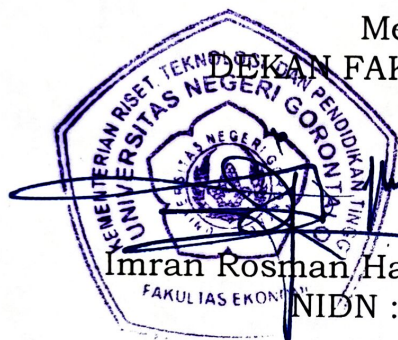
Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum
NIDN : 0009046804

PIHAK KEDUA

Dr. Muhammad Amir Arham, M.E
NIDN : 0025077203

Mengetahui

DEKAN FAKULTAS EKONOMI



Imran Rosman Hambali, S.Pd., S.E., M.SA
NIDN : 0023087004

Kode/Nama Rumpun Ilmu	: 561/Ekonomi Pembangunan
Tema	: Ekonomi Publik/Ketimpangan dan Kemiskinan

LAPORAN AKHIR

PENELITIAN BERBASIS KOMPETENSI



KEBIJAKAN FISKAL (TRANSFER DANA DESA), KETIMPANGAN DAN KEMISKINAN PERDESAAN DI INDONESIA

Tahun ke 1 dari rencana 2 Tahun

DR. MUHAMMAD AMIR ARHAM, M.E.
DR. SUKARMAN KAMULI, M.SI.
BOBBY RANTAW PAYU, S.SI., M.E.

NIDN : 0025077203
NIDN : 0006066707
NIDN : 0022088302

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
OKTOBER 2018

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : KEBIJAKAN FISKAL (TRANSFER DANA DESA),
KETIMPANGAN DAN KEMISKINAN PERDESAAN
DI INDONESIA

Peneliti/Pelaksana

Nama Lengkap : Dr MUHAMMAD AMIR ARHAM, S.Pd
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Gorontalo
NIDN : 0025077203
Jabatan Fungsional : Lektor
Program Studi : Pendidikan Ekonomi
Nomor HP : 081395463352
Alamat surel (e-mail) : amier_archam@yahoo.com

Anggota (1)

Nama Lengkap : Dr. Drs SUKARMAN KAMULI M.Si
NIDN : 0006066707
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Gorontalo

Anggota (2)

Nama Lengkap : BOBY RANTOW PAYU M.E, S.Si.
NIDN : 0022088302
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Gorontalo

Institusi Mitra (jika ada)

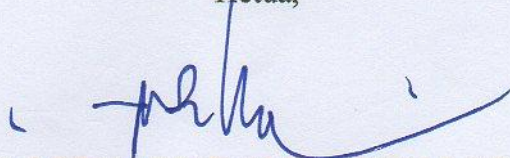
Nama Institusi Mitra : -
Alamat : -
Penanggung Jawab : -
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 2 tahun
Biaya Tahun Berjalan : Rp 150,000,000
Biaya Keseluruhan : Rp 150,000,000

Mengetahui,
Dekan



(Imran Rosman Hambali, SPd., SE., MSA)
NIP/NIK 197008231999031005

Kota Gorontalo, 5 - 11 - 2018
Ketua,



(Dr MUHAMMAD AMIR ARHAM, S.Pd)
NIP/NIK 197207252006041002

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat



(Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, S.H., M.Hum.)
NIP/NIK 196804091993032001

RINGKASAN

Desa merupakan ujung tombak pelayanan pemerintahan di Indonesia, selama puluhan tahun wilayah ini cenderung kurang diperhatikan dalam hal alokasi anggaran untuk pengelolaan pemerintahan dan pembangunan. Akibatnya ketimpangan antar kota – desa makin melebar, selain itu dinamika kemajuan ekonomi perkotaan terus meningkat diwaktu yang bersamaan kondisi perdesaan cenderung makin terbelakang. Sehubungan hal tersebut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa lahir dalam rangka mempercepat pembangunan perdesaan. Selanjutnya studi ini dilakukan dengan tujuan ingin melihat sejauh mana pengaruh transfer Dana Desa (DD) terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia selama periode dilakukannya transfer Dana Desa. Metode yang digunakan adalah analisis ekonometrika dengan persamaan data panel melalui pendekatan *fix effect model*, untuk 33 provinsi pada periode tahun 2015 – 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transfer Dana Desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan di Indonesia, dengan demikian dapat disimpulkan bilamana Pemerintah Indonesia meningkatkan transfer Dana Desa maka akan mendorong penurunan ketimpangan distribusi pendapatan.

Key Word: Dana Desa dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan

PRAKATA

Desa merupakan wilayah terdepan dalam pengelolaan pembangunan, kemajuan suatu negara dicerminkan sejauh mana kemajuan desa-desa di suatu wilayah. Tetapi pada kenyataannya pembangunan perdesaan selama ini kurang mendapatkan perhatian dibandingkan wilayah perkotaan, sebab pada kenyataannya kemajuan perkotaan sebagian besar digerakkan ekonominya oleh swasta. Wilayah perkotaan sumber kegiatan ekonominya beragam, sementara wilayah perdesaan kegiatan ekonomi masyarakat lebih mengandalkan sektor pertanian. Maka untuk membangun masyarakat perdesaan memerlukan perhatian dan kebijakan afirmatif yang kuat dari pemerintah.

Alokasi anggaran selama ini untuk kegiatan ekonomi perdesaan masih terbatas, pada saat yang bersamaan saran dan prasaran penunjang kegiatan ekonomi terbatas dibandingkan wilayah perkotaan, hal ini mendorong meningkatnya urbanisasi sekaligus menciptakan disparitas yang makin tinggi antara wilayah perkotaan dan perdesaan, selain itu pendapatan masyarakat perkotaan makin meningkat sehingga ketimpangan distribusi pendapatan juga makin melebar. Melihat kenyataan seperti perhatian terhadap pembangunan perdesaan sangat diperlukan dalam rangka untuk mengurangi ketimpangan dan menurunkan angka kemiskinan.

Salah satu model kebijakan yang dianggap mengatasi kedua persoalan tersebut yakni perlunya memperkuat desentralisasi anggaran, dengan memberikan anggaran khusus pembangunan perdesaan lewat kebijakan transfer dana desa. Alokasi dana desa merupakan perintah UU No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa yang mulai berlaku efektif 2015. Dana desa setiap tahun terus meningkat yang dialokasikan dari APBN, dengan demikian pelaksanaan Alokasi Dana Desa telah memasuki tahun ketiga. Atas dasar itu pelaksanaan Alokasi Dana Desa perlu dilihat efeknya sejauh mana anggaran ini dapat mengatasi masalah ketimpangan dan kemiskinan perdesaan.

Sebagai akademisi yang memperdalam peminatan masalah kajian keuangan public yang didalamnya masuk rezim keuangan desa memiliki

tanggungjawab moral secara akademis melakukan kajian dan evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa setidaknya dalam dua tahun sejak pelaksanaanya, dengan melakukan penelitian **“Kebijakan Fiskal (Transfer Dana Desa), Ketimpangan dan Kemiskinan Perdesaan di Indonesia”**. Skema penelitian yang kami lakukan adalah Hibah Kompetensi selama dua tahun, dan penelitian tahun pertama memfokuskan pada aspek ketimpangan, dalam hal ini ingin melihat sejauh mana pengaruh Transfer Dana Desa terhadap Ketimpangan di Indonesia. Untuk penelitian tahun pertama telah kami lakukan, meskipun sebelum seluruhnya lengkap sebab laporan baru berupa laporan kemajuan.

Selesainya laporan ini tentu saja merupakan kerja keras dari tim peneliti, selain itu keterlibatan dan bantuan pihak lain turut memiliki andil dalam pelaksanaan penelitian, terutama pihak LPPM UNG, Badan Pusat Statistik, Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal dan Kementerian Keuangan. Oleh sebab itu kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas terlaksananya kegiatan penelitian ini, puncak terima kasih kami kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya karena kegiatan penelitian ini dapat berlanar.

Gorontalo, September 2018

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

	Hal
LEMBAR PENGESAHAN	i
RINGKASAN	ii
PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Teori Desentralisasi	6
2.2. Teori Transfer Antar Tingkat Pemerintah	13
2.3. Transfer Antar Tingkat Pemerintah di Indonesia	21
2.4. Teori Transfer dan Alokasi Dana Desa	26
2.5. Teori Ketimpangan	28
BAB 3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	31
3.1. Tujuan Penelitian	31
3.2. Spesifikasi Model	32
3.3. Metode Pengolahan dan Analisis Data	33
BAB 5 HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI	34
5.1. Hasil dan Pembahasan	34
5.2. Luara yang Dicapai	38
BAB 6 RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA	39
BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN	40
7.1. Kesimpulan	40
7.2. Saran	40
DAFTAR PUSTAKA	42

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul Tabel	Hal
Tabel 1	Hasil Uji Hausman (<i>Hausman Test</i>)	34
Tabel 2	Statistik Deskriptif	35
Tabel 3	Ringkasan Hasil Estimasi Persamaan Ketimpangan Distribusi Pendapatan	36
Tabel 4	Luaran yang Dicapai Dalam Penelitian	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul Gambar	Hal
Gambar 1.1	Peranan Kawasan Dalam Pembentukan PDB, 2016	2
Gambar 1.2.	Perkembangan Gini Ratio Indonesia Tahun 2010 - 2016	3
Gambar 2.1	Effek Transfer Tak Bersyarat (Block Grant)	16
Gambar 2.2	Effek Transfer Nonmatching Bersyarat	18
Gambar 2.3	Effect of Open-Ended Matching Grant	19
Gambar 2.4	Effect of Closed-Ended Matching Grant	20
Gambar 2.5	Pengaruh DAU terhadap Kesejahteraan Masyarakat	24

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul Lampiran	Hal
Lampiran 1	Artikel Pertama Dengan Status Submit	48
Lampiran 2	Artikel Kedua Dengan Status Submit (verifikasi)	50

BAB 1

PENDAHULUAN

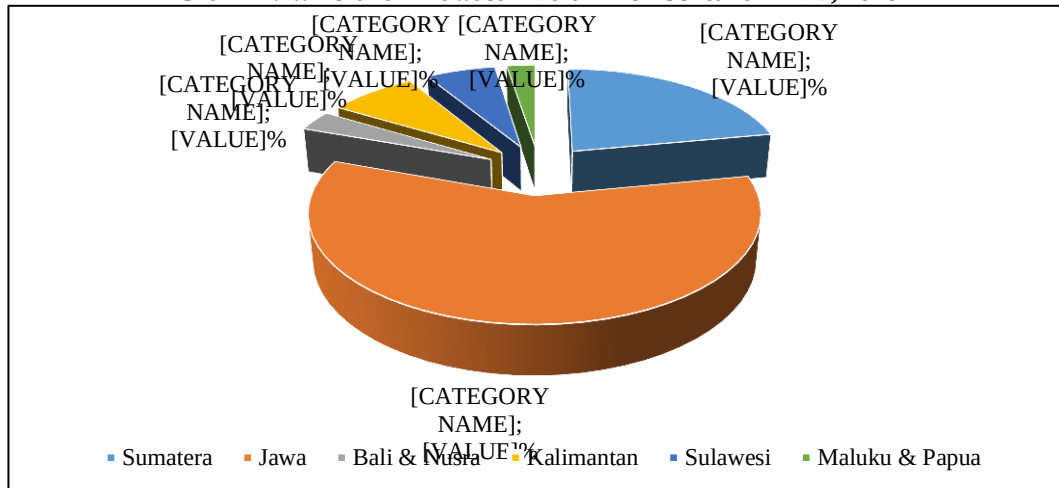
Tantangan terberat yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini dalam pembangunan ekonomi, yakni ketimpangan. Jika dilakukan pembagian masalah ketimpangan, maka ada dua hal pokok yang dilihat diantaranya ketimpangan antar kawasan dan ketimpangan distribusi pendapatan. Sekalipun demikian, bahwa ketimpangan sesungguhnya masalah universal yang pernah dihadapi oleh semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Berbagai studi empiris dan literatur ekonomi pembangunan menjelaskan bahwa pada awalnya proses pembangunan kecenderungan terjadi ketimpangan, namun lama kelamaan kondisi ketimpangan menurun.

Oleh sebab itu ketimpangan merupakan masalah klasik ekonomi, tetapi membutuhkan keseriusan untuk mengatasinya, sebab jika dibiarkan begitu saja maka akan menimbulkan dampak sosial. Ketimpangan antar kawasan dan distribusi pendapatan seringkali menjadi pemicu pertentangan antar kelompok masyarakat, serta dapat menjadi pemicu disintegrasi bangsa. Melihat fenomena tersebut *World Bank* membuat program *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2015 yang berfokus pada 10 Butir. Butir kesepuluh dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah mengurangi ketimpangan.

Di Indonesia sendiri diyakini bahwa faktor utama pendorong tingginya ketimpangan antar kawasan dan distribusi pendapatan karena selama puluhan tahun arah kebijakan pembangunan ekonomi terlalu menekankan efisiensi sehingga kegiatan ekonomi makin terkonsentrasi di dua kawasan (pulau) Sumatera dan Jawa, dan bilamana diakumulasi peran kedua pulau tersebut terhadap pembentukan ekonomi nasional menyumbang sekitar 80 persen, sementara di Kawasan Timur Indonesia (KTI) hanya sekitar 20 persen saja. Akibatnya pembangunan masih terkonsentrasi pada wilayah tertentu saja yang efisien secara ekonomi, jika dipetakan perkawasan dimana pembentukan ekonomi secara nasional sangat didominasi oleh dua kawasan, yakni Pulau Sumatera dan Jawa

kedua kawasan (pulau) tersebut berada di belahan barat Indonesia, sementara Kawasan Timur Indonesia kontribusinya sangat sedikit sebagaimana terlihat pada gambar 1 di bawah ini.

Grafik 1.1.: Peranan Kawasan Dalam Pembentukan PDB, 2016

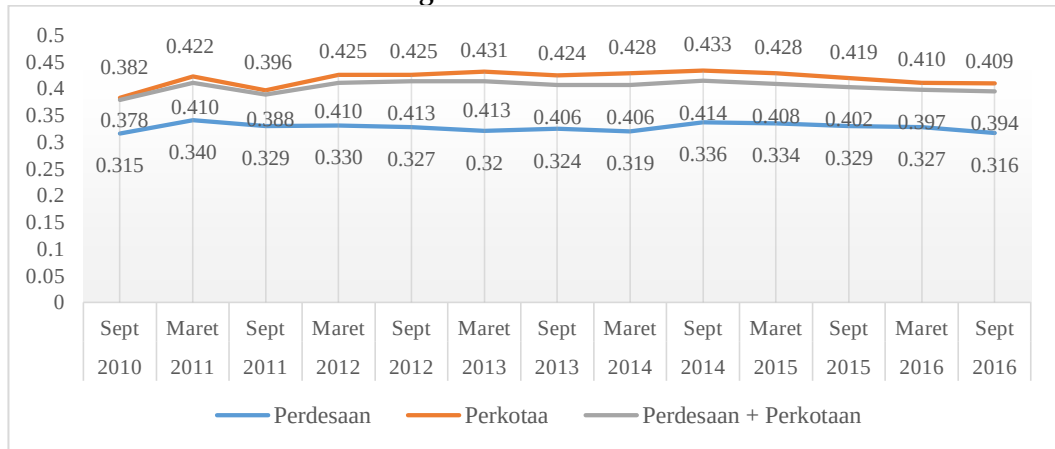


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016. (Diolah).

Berdasarkan data di atas menggambarkan dimana Pulau Jawa kontribusinya terhadap pembentukan ekonomi nasional sebesar 58, persen, Sumatera menyumbang sebesar 22,02 persen, sedangkan di KTI termasuk didalamnya adalah Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara dan Maluku-Papua masing-masing menyumbang di bawah 10 persen.

Sementara tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia dalam lima tahun terakhir cenderung mengalami penurunan, namun beberapa provinsi masih tinggi. Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Rati, nilai Gini Ratio antara 0 – 1. Secara nasional Gini ratio Indonesia tahun 2010 tercatat sebesar 0,378 dan meningkat menjadi 0,410 pada tahun 2011, namun mengalami penurunan pada September 2011 sebesar 0,388. Pada periode Maret 2012 hingga September 2014 Gini ratio mengalami fluktuasi dan mencapai angka tertinggi pada September 2014 sebesar 0,414. Pada Maret 2015 Gini ratio mulai turun menjadi 0,408 dan terus menurun hingga mencapai 0,394 pada September 2016, secara rinci dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini.

Gambar 1.2: Perkembangan Gini Ratio Indonesia Tahun 2010 - 2016



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016. (Diolah).

Berbagai terobosan yang telah ditempuh oleh pemerintah untuk mendorong penurunan ketimpangan kawasan nampaknya belum membuahkan hasil. Salah satu model kebijakan yang diyakini dapat mengurangi ketimpangan adalah kebijakan desentralisasi fiskal. Selama 16 tahun lebih kebijakan ini berjalan, kondisinya tidak jauh berbeda pada masa Orde Baru, ketimpangan tetap tinggi. Masih tingginya ketimpangan antar kawasan, dan dominannya kawasan Pulau Jawa memberikan peranan terhadap perekonomian nasional salah satu penyebabnya karena pangsa sektor primer (pertanian) masih dominan berkontribusi terhadap PDRB di luar Pulau Jawa, khususnya di KTI.

Pada saat yang bersamaan pertumbuhan sektor pertanian yang lambat, sementara sektor tersebut paling banyak menyerap tenaga kerja, kondisi ini mengakibatkan ketimpangan desa-kota makin melebar, apalagi wilayah perkotaan sumber kehidupan lebih variatif, sehingga makin memperkuat *"backwash effect"* ekonomi perkotaan terhadap ekonomi perdesaan. Hanya saja tarikan ekonomi perkotaan menyebabkan masyarakat perkotaan makin kompetitif sementara sebagian para urbanis memiliki keterampilan yang terbatas yang dipersyaratkan bekerja di sektor formal. Bagi masyarakat perkotaan yang memiliki sumber daya dapat mengoptimalkan produktifitas dan kegiatan ekonominya sehingga pendapatannya makin tinggi. Lain halnya para urbanis dan sebagian masyarakat perkotaan input produksinya terbatas mengakibatkan penghasilannya rendah, pada akhirnya makin melahirkan ketimpangan distribusi pendapatan antar penduduk

desa dan kota. Hal ini terbangun karena sumber kehidupan perkotaan makin beragam, pada saat yang sama sumber kehidupan perdesaan terbatas disektor pertanian yang minim nilai tambah. Padahal jumlah desa di Indonesia jauh lebih banya ketimbang wilayah perkotaan (kelurahan), saat ini jumlah desa sebanyak 74,093 dan 8,300 kelurahan tersebar di 34 provinsi. Konsekuensi logisnya pembangunan yang bertumpu pada perkotaan, lahan makin terbatas yang berdampak terhadap makin mahalnya biaya konstruksi di perkotaan.

Menyadari kondisi pendesaan yang tertinggal, serta model kebijakan selama ini yang kurang memberikan perhatian terhadap pembangunan desa, maka pemerintah melahirkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Menurut UU ini Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan lahirnya UU tersebut maka memiliki konsekuensi munculnya transfer Dana Desa. Dengan demikian jenis transfer ke daerah bertambah selain Dana Otonomi Khusus yang diperuntukkan ke Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat. Jika dilihat dari kriteria dan jenis transfer maka transfer Dana Desa (DD) termasuk dalam jenis transfer dengan tujuan umum karena sifatnya *unconditional*. Program dana desa merupakan kebijakan fiskal yang pengelolaannya bersifat otonom, dimana aparat desa selaku pengelola dana desa diberikan kewenangan dalam hal pemanfaatan (anggaran belanja).

Stimulasi alokasi anggaran ini (transfer dana desa) diasumsikan akan mendorong kegiatan ekonomi perdesaan sekaligus dapat menciptakan dampak ekonomi, sehingga memiliki implikasi yang kuat terhadap penurunan ketimpangan antar desa-kota. Ini sejalan dengan argumentasi yang dikemukakan oleh Crudu (2015), bahwa kebijakan fiskal seperti transfer Dana Desa salah satu alat yang paling penting bagi pemerintah untuk mempengaruhi distribusi pendapatan, serta berbagai literatur menyebutkan dimana transfer fiskal dapat mendorong perbaikan distribusi pendapatan (Checerita, Nickel dan Rother, 2009b). Sekalipun penelitian yang dilakukan oleh Huang dan Chen (2012) di

China berbeda hasilnya justru dana transfer tidak signifikan memperbaiki ketimpangan, ini tidak lain karena model transfer yang diberlakukan tidak berbasis kebutuhan dan aturan yang ada.

Sekaitan dengan hal tersebut transfer Dana Desa memberikan konsekuensi logis dimana pemerintah desa dituntut untuk menyusun perencanaan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai formula untuk mendesain perencanaan secara terstruktur, sebab selama ini pemerintahan desa tidak memiliki perencanaan yang baik, tidak ada penganggaran yang terpola. Akibatnya program yang disusun belum tentu memiliki dampak terhadap kinerja perekonomian desa, termasuk perbaikan ketimpangan. Tidak sedikit pemerintah desa untuk menyusun perencanaan dan anggaran menemui banyak kendala, khususnya dalam penyusunan program prioritas, apalagi dalam pemanfaatan dana desa harus digunakan seefisien dan seefektif mungkin sesuai dengan tujuan pembangunan desa. Dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PERMENDES PDT) No. 5 Tahun 2015 menegaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan ingin melihat sejauh mana efektifitas transfer dana desa terhadap ketimpangan perdesaan diseluruh provinsi di Indonesia selama tahun 2015 – 2016, dan menganalisis variabel apa saja yang memiliki determinasi paling kuat menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Desentralisasi

Menjelaskan masalah desentralisasi fiskal tidak dapat dipisahkan dengan konsep desentralisasi secara umum yang di dalamnya menyangkut masalah administratif dan politis. Oleh karena itu mendefinisikan desentralisasi fiskal akan selalu berkaitan satu sama lain ketiga hal tersebut, dan merupakan prasyarat untuk mencapai tujuan desentralisasi, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desentralisasi politik merupakan tonggak terwujudnya demokratisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Sementara desentralisasi administrasi merupakan instrumen untuk menjalankan pelayanan kepada masyarakat, dan desentralisasi fiskal memiliki fungsi untuk mewujudkan pelaksanaan desentralisasi politik dan administrasi melalui pelimpahan kewenangan di bidang fiskal (Mardiasmo, 2009:563).

Secara prinsipil ketiga jenis desentralisasi tersebut semua menekankan pelimpahan kewenangan ke pemerintah daerah, diikuti oleh pembiayaan dari pemerintah pusat. Maka dari itu desentralisasi dapat dimaknai sebagai gambaran sejauh mana kewenangan dipegang oleh pemerintah daerah untuk mampu mengambil keputusan sendiri yang mengikat beberapa kebijakan pada ruang lingkup pemerintahan daerah (Litvack *et. al*, 1998:8). Mencermati ketiga jenis desentralisasi penjabarannya cukup luas, maka uraian selanjutnya lebih fokus mengkaji masalah desentralisasi fiskal. Dimana desentralisasi fiskal merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar daerah lainnya, disertai perbaikan pelayanan publik, efisiensi pemanfaatan sumber daya, disamping itu untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dalam tataran lebih aplikatif, desentralisasi fiskal sebagai pelimpahan kewenangan pengelolaan potensi ekonomi dan sumber daya lainnya di daerah, namun tetap disertai transfer dari pemerintah pusat. Besarnya transfer dana ke daerah dan kemungkinan peningkatan penerimaan diharapkan memiliki korelasi

yang kuat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terjadi karena pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memprioritaskan kegiatan yang lebih tepat sasaran, intervensi dari pemerintah ditingkat atas relatif minim, sehingga daerah lebih mandiri mengambil keputusan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Bird dan Vaillancourt, (1998:4) menjelaskan konsep desentralisasi fiskal dalam kaitannya dengan derajat kemandirian pengambilan keputusan yang dilakukan daerah.

1. Desentralisasi berarti pelepasan tanggung jawab yang berada dalam lingkungan pemerintah pusat ke instansi vertikal di daerah atau ke pemerintah daerah (Dekonsentrasi).
2. Daerah bertindak sebagai perwakilan pemerintah untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu atas nama pemerintah pusat (Perwakilan).
3. Pelimpahan berhubungan dengan suatu situasi yang bukan saja implementasi tetapi juga kewenangan untuk memutuskan apa yang perlu dikerjakan di daerah (Devolusi).

Dari ketiga jenis desentralisasi tersebut, yang dianggap ideal yakni devolusi dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas baik secara administratif, politik maupun kewenangan-kewenangan di bidang ekonomi untuk menggali potensi yang dimiliki oleh daerah. Pelaksanaan desentralisasi tanpa diberikan kewenangan yang besar kepada pemerintah daerah, maka tujuan dari pelaksanaan desentralisasi itu sendiri sulit tercapai. Oleh sebab itu dalam pelaksanaan desentralisasi diperlukan kewenangan, terutama untuk mengembangkan potensi ekonomi.

Perlunya dilakukan pelimpahan wewenang, menurut Tiebout (1956:418) karena akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam melayani kebutuhan barang publik dengan lebih baik dan lebih efisien. Alasan mendasar peningkatan kemampuan pelayanan tersebut karena pemerintah daerah dipandang lebih mengetahui kebutuhan dan karakter masyarakat lokal, sehingga program-program dari kebijakan pemerintah akan lebih efektif untuk dijalankan, sekaligus dari sisi penganggaran publik akan muncul konsep efisiensi karena tepat guna dan berdaya guna.

Dengan demikian pelaksanaan desentralisasi fiskal menjadi penting untuk dilakukan karena memiliki alasan mendasar. Alasan-alasan ekonomi untuk dilakukan desentralisasi diantaranya untuk meningkatkan penyediaan barang publik pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, selanjutnya akan berimplikasi luas terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, diharapkan ketimpangan distribusi pendapatan antar daerah juga makin menurun. Ananda (2002:26-27) menyebutkan bahwa ada dua alasan ekonomi dilakukannya desentralisasi fiskal, yaitu;

1. Desentralisasi dilakukan untuk efisiensi alokasi sumberdaya, dimana keputusan tentang pengeluaran publik yang dibuat oleh pemerintah akan lebih dekat dengan masyarakat, serta akuntabilitasnya lebih besar bila dilakukan oleh pemerintah daerah, oleh karenanya desentralisasi lebih rasional daripada sentralisasi.
2. Meningkatkan kemampuan bersaing bagi pemerintah daerah, serta mendorong inovasi, sehingga pemerintah daerah akan selalu berusaha untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan masyarakatnya. Pada gilirannya berimplikasi dimana masyarakat menjadi lebih suka membayar kewajiban-kewajibannya (membayar pajak dan retribusi daerah) untuk pembiayaan pengadaan barang publik dengan memprioritaskan kebutuhan masyarakat bersangkutan, bahkan masyarakat ikut berpartisipasi memberikan pelayanan.

Selanjutnya, desentralisasi fiskal akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, atau desentralisasi fiskal berpotensi memberikan kontribusi dalam bentuk peningkatan efisiensi pemerintahan dan laju pertumbuhan ekonomi karena pemerintah lokal (daerah) akan lebih efisien untuk kegiatan produksi dan penyediaan barang-barang publik. Pengambilan keputusan pada level pemerintah lokal akan lebih didengarkan untuk menganeekaragamkan pilihan lokal dan lebih berguna bagi efisiensi alokasi (Oates, 1993:237; Musgrave dan Musgrave 1989:5, dan Wellisch, 2004:25). Selain itu menurut De Mello (2000) dengan membawa pemerintah lebih dekat dengan masyarakat di daerah, desentralisasi fiskal diharapkan dapat meningkatkan

efisiensi sektor publik, serta akuntabilitas dan transparansi dalam pemberian layanan dan pembuatan kebijakan.

Dalam rangka penyediaan layanan publik, ada dua butir penjelasan yang diperoleh dari pendekatan konsep Musgravian dan neo-klasik tentang fungsi-fungsi pemerintahan. *Pertama*, diterimanya pendapat bahwa pilihan-pilihan (*choices*) pemerintah daerah itu lebih mendekati atau lebih sesuai dengan pilihan-pilihan individual ketimbang pilihan-pilihan yang dibuat pemerintah (pusat). *Kedua*, pengambilan keputusan yang terdesentralisasi akan bekerja lebih baik apabila preferensi itu bersifat homogen. Oleh sebab itu desentralisasi atau pelimpahan tanggungjawab pengeluaran akan membawa kesejahteraan lebih optimal. Alokasi sumberdaya akan lebih efisien apabila diserahkan pada pemerintahan pada level bawah (Simanjuntak, 2003:4). Penjelasan ini sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Gramlich (1993:229), dimana barang dan jasa publik semestinya disediakan oleh pemerintahan ditingkat (level) bawah atau daerah dengan batas administrasi yang paling kecil dimana daerah itu mendapatkan manfaat dari distribusi.

Sementara itu, Sidik (2009:540) menguraikan tujuan umum program desentralisasi fiskal di Indonesia, yaitu;

1. Meningkatkan alokasi nasional dan efisiensi operasional pemerintah daerah.
2. Memenuhi aspirasi daerah, memperbaiki struktur fiskal secara keseluruhan dan memobilisasi pendapatan daerah dan kemandirian nasional.
3. Meningkatkan akuntabilitas, meningkatkan transparansi dan mengembangkan partisipasi konstituen dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah.
4. Mengurangi kesenjangan fiskal antarpemerintah daerah, memastikan pelaksanaan pelayanan dasar masyarakat diseluruh Indonesia, dan.
5. Memperbaiki kesejahteraan sosial rakyat Indonesia.

Sejalan dengan argumentasi di atas Steffensen (2010:3) menyebutkan tujuan dari desentralisasi fiskal secara keseluruhan, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Peningkatan efisiensi, dengan memperkuat hubungan antara layanan dengan permintaan masyarakat sesuai kebutuhannya, maka pemerintah daerah yang lebih dekat akan lebih responsif terhadap preferensi masyarakat lokal.
2. Peningkatan akuntabilitas keuangan, dengan membawa pemerintahan dan keputusan lebih dekat kepada masyarakat dalam hal pemilihan suara, pengaruh, pertukaran informasi, dan monitoring dan lain-lain lebih muda dilakukan, dan.
3. Peningkatan efektivitas, akan meningkatkan kemungkinan memperkuat persaingan dalam penyediaan layanan publik antar daerah, sehingga dapat memobilisasi kontribusi warga, melakukan inovasi dan lain-lain.

Menurut Barzelay (1991), pelimpahan sebagian besar wewenang (urusan) atau dengan kata lain pelaksanaan otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal terkandung tiga tujuan utama, yaitu: *a)*. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya yang dimiliki daerah, *b)*. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, *c)*. Memberdayakan dan menciptakan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Masalah pemberdayaan masyarakat menjadi penting dijelaskan, sebab pandangan tradisional tentang desentralisasi fiskal (*fiscal federalism*) lebih banyak membicarakan fungsi dan pemberdayaan fiskalnya semata. Padahal sudah terjadi pergeseran pandangan mengenai desentralisasi fiskal, hal ini semakin diakui bahwa desentralisasi fiskal seharusnya tidak hanya didefinisikan sebagai pergeseran sumber daya dan otoritas fiskal ke tingkat subnasional (daerah), melainkan sebagai pemberdayaan masyarakat melalui pemberdayaan fiskal pemerintah daerah.

Martinez-Vazquez dan McNab (2003) mengemukakan bahwa ada dua alasan mengenai efisiensi (ekonomi) desentralisasi fiskal, yaitu; *Pertama*, apabila pemerintah lokalnya cerdas dan mampu membaca keinginan konstituennya maka akan mudah dalam mengadaptasikan kebijakan pengeluarannya, sehingga dengan hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan individu. *Kedua*, pengeluaran ataupun pembelanjaan ditingkat lokal akan mendorong *producer efficiency* akibat pelayanan yang lebih murah untuk penyediaan infrastruktur.

Dari segi efisiensi, adanya desentralisasi fiskal pengeluaran pemerintah jauh lebih efisien ketimbang ditangani oleh pemerintah pusat, kemudian daripada itu, desentralisasi fiskal akan meningkatkan efisiensi ekonomi karena pemerintah daerah memiliki posisi yang lebih baik daripada pemerintah pusat dalam menyalurkan pelayanan publik yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Dengan adanya desentralisasi fiskal pada kelanjutannya efisiensi akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi ditingkat daerah dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional (Oates, 1972:196). Pembuktian empiris hubungan positif antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi telah dilakukan oleh Xie *et.al.* (1999), Akai dan Sakata (2002), Akai *et. al.* (2009), Lin dan Liu (2000), Ding (2007), Ismail *et.al.*, (2004), dan Samimi *et.al.* (2010). Namun tidak semua kajian empirik menunjukkan pola yang sama, beberapa diantaranya menunjukkan sebaliknya, desentralisasi fiskal berkorelasi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, seperti yang ditemukan oleh Davoodi dan Zou (1998), Baskaran dan Feld (2009), Jin dan Rider (2010).

Merujuk pada beberapa teori dan dikuatkan dengan bukti empiris di beberapa negara, makin diyakini bahwa desentralisasi sebagai sistem pemerintahan dapat memacu laju pembangunan ekonomi daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, disamping mengembangkan prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat lebih nyata. Selain itu, desentralisasi dapat memacu pertumbuhan ekonomi secara nasional, sekaligus untuk mengatasi masalah kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, serta antar daerah. Hal ini secara empiris sudah dibuktikan oleh Bohte dan Meier (2000), Lessmann (2009) dan Widhiyanto (2008).

Ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal sangat diperlukan bagi negara besar seperti Indonesia. Tidak mungkin semua urusan dilakukan secara terpusat, karena faktanya selama pemerintahan sentralistik ketimpangan distribusi pendapatan sangat tinggi, demikian juga ketimpangan antar wilayah Jawa dan luar Jawa, Indonesia bagian timur dan Indonesia bagian barat. Brodjonegoro *et.al* (2001:3), dengan adanya desentralisasi fiskal diharapkan pemerintah daerah akan lebih efektif dan mampu untuk memenuhi pelayanan publik yang dibutuhkan,

membangun sarana perekonomian serta dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakatnya sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Agar desentralisasi fiskal lebih optimal, pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip *money follow functions*, artinya penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintah membawa konsekuensi anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut, karena itu penyerahan kewenangan daerah juga dibarengi dengan penyerahan sumber-sumber pembiayaan yang sebelumnya masih dipegang oleh pemerintah pusat (Abimanyu, 2000:3, Waluyo, 2007:2). Perimbangan keuangan pusat-daerah dilakukan melalui mekanisme dana perimbangan, yaitu pembagian penerimaan antar tingkatan pemerintahan guna menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dalam kerangka desentralisasi.

Dua hal pokok patut diperhatikan dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal yang terkait dengan dana perimbangan, yaitu melalui pendekatan *expenditure assignment* dan *revenue assignment*. Pendekatan *expenditure assignment* menyatakan bahwa terjadi perubahan tanggung jawab pelayanan publik dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, sehingga peran *local public goods* meningkat. Kemudian pendekatan *revenue assignment* yaitu memberikan peningkatan kemampuan keuangan, melalui alih sumber pembiayaan pusat kepada daerah, dalam rangka membiayai fungsi yang didesentralisasikan (Mahi, 2002:5).

Tujuan utama pemberian dana perimbangan dalam kerangka otonomi daerah untuk pemerataan kemampuan fiskal pada tiap daerah (*equalizing transfer*), disamping itu daerah diberikan keleluasaan menggali potensinya, maka idealnya setiap daerah otonom makin mandiri dan dapat membiayai pembangunannya melalui PAD. Meskipun demikian menurut Alisjahbana (2000:3), bahwa diskresi kewenangan daerah dalam penentuan penggunaan penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) menjadi sangat besar, tetapi harus diingat bahwa daerah tidak mempunyai kewenangan untuk mempengaruhi sumber maupun besar penerimaan itu sendiri. Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dilakukan melalui

mekanisme yang ditentukan pusat, demikian pula dengan ketentuan bagian daerah dari Sumber Daya Alam (SDA), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Penggunaan Hak atas Tanah Bangunan (BPHTB) dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Istilah yang lebih tepat digunakan bagi implikasi implementasi UU-PKPD bagi daerah adalah terjadinya pergeseran hubungan keuangan pusat-daerah dari sentralisasi fiskal ke desentralisasi “pengeluaran”, bukan desentralisasi fiskal dalam arti yang sesungguhnya.

2.2. Teori Transfer Antar Tingkat Pemerintah

Perimbangan keuangan pusat dan daerah atau transfer antar tingkat pemerintah (*intergovernmental fiscal transfers*) merupakan salah satu bentuk hubungan yang umum dilaksanakan di banyak negara. Hubungan fiskal antar tingkat pemerintahan menggambarkan hubungan keuangan diantara berbagai tingkat pemerintahan, yang meliputi berbagai aktifitas keuangan pemerintah seperti perpajakan, pengeluaran, pinjaman, subsidi, transfer dan hibah. Transfer fiskal antar tingkat pemerintahan terdiri atas hibah (*grants*), dan bagi hasil (*revenue-sharing*) merupakan sumber penerimaan yang paling dominan bagi tingkat pemerintahan daerah di banyak negara sedang berkembang. Dimana desain dari transfer tersebut memiliki pengaruh terhadap efisiensi dan keadilan atau pemerataan penyediaan barang publik dari pemerintah daerah. Atas dasar itu maka diperlukan desain transfer untuk menentukan keberhasilan desentralisasi fiskal (Litvack, *et.al.* 1998:12).

Ma, (1997:4-5) menyebutkan bahwa model *intergovernmental fiscal transfer* pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut;

1. Model alokasi transfer yang mempertimbangkan kesenjangan fiskal (*fiscal gap*). Model ini merupakan model yang paling ideal, karena didasarkan atas pertimbangan selisih antara kebutuhan dan kapasitas fiskal. Tetapi, persyaratan utama menggunakan model ini adalah ketersediaan data, khususnya yang terkait dengan pengeluaran (*expenditure needs*) yang seringkali melibatkan variabel yang cukup kompleks. Karena persyaratan

tersebut, maka model ini lebih banyak diterapkan di negara-negara maju yang memiliki teknologi informasi yang relatif baik.

2. Model alokasi transfer berdasarkan pertimbangan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) antar daerah. Model transfer diberikan berdasarkan kapasitas masing-masing, dimana daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang besar akan mendapatkan bagian yang kecil, dan sebaliknya daerah yang memiliki kapasitas fiskal kecil mendapatkan transfer secara proporsi lebih besar. Model ini relatif lebih mudah diterapkan, karena alokasi lebih didasarkan atas kapasitas fiskal antar daerah. Namun, model ini cenderung mengabaikan kebutuhan fiskal antar daerah, padahal kebutuhan fiskal berbeda antar daerah satu dengan daerah lainnya.
3. Model alokasi transfer yang didasarkan atas berbagai indikator “kebutuhan”. Dalam model ini alokasi transfer dimaksudkan sebagai upaya agar setiap daerah mampu memenuhi kebutuhan pelayanan publik minimumnya.
4. Model alokasi transfer berdasarkan kesamaan basis pajak per kapita. Besaran transfer diberikan sama besar berdasarkan potensi fiskal dan potensi pajak kepada daerah bersangkutan. Model alokasi ini merupakan model yang paling sederhana dan tidak membutuhkan persyaratan data yang kompleks. Namun demikian, model ini kurang memiliki pengaruh terhadap pemerataan kapasitas fiskal antar daerah.

Sementara itu, menurut Ma (1997:5-6), Shah (1994:37-40), Shah (2006:4-5), dan Rosen (2008:530) pada dasarnya ada dua *intergovernmental transfer* yaitu;

- A. Hibah bersyarat (*Conditional grant*); Ini kadang-kadang disebut bantuan untuk tujuan tertentu atau hibah kategoris. Pemerintah pusat menetapkan tujuan spesifik bagi pemerintah penerima untuk penggunaan dana. Transfer seperti itu sering digunakan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu yang menurut pusat sangat penting namun dianggap kurang begitu penting oleh pemerintah daerah. Contohnya adalah proyek-proyek yang memiliki *inter-regional spill-over effects*. Dalam transfer bersyarat, ada beberapa jenis:

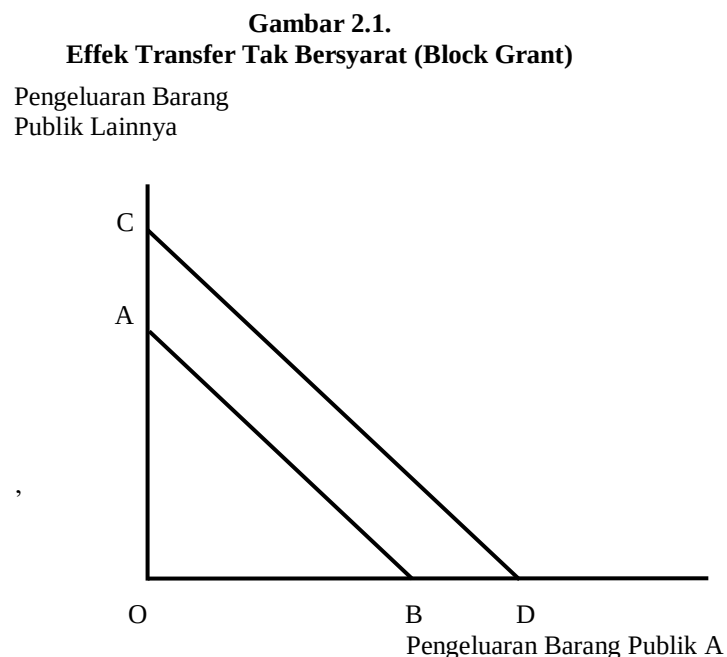
1. *Matching Open-Ended Grants*. Untuk unit uang yang diberikan oleh donor untuk mendukung kegiatan tertentu, dengan jaminan penerima transfer juga harus mengeluarkan uang. Sebagai contoh, transfer yang menunjukkan bahwa setiap kali pemerintah daerah menghabiskan satu rupiah untuk pendidikan, maka pemerintah pusat akan memberikan kontribusi satuan rupiah juga. Dengan *matching open-ended grants*, biaya untuk donor sangat bergantung pada perilaku penerima. Jika pengeluaran pemerintah lokal penuh semangat distimulasi oleh program, maka pemerintah pusat akan berkontribusi sangat besar, dan sebaliknya.
 2. *Matching Closed-Ended Grants*. Untuk memberikan biaya tertinggi yang ditanggung oleh pemerintah pusat, pusat dapat menentukan beberapa jumlah maksimum yang akan diberikan kepada daerah penerima. Ini disebut *closed-ended matching grant*. Mekanisme ini digunakan oleh sebagian besar negara karena yang memiliki perhatian terhadap kontrol anggaran.
 3. *Non-Matching Grants*. Dalam hal ini, pemerintah pusat tetap menawarkan sejumlah uang dengan ketentuan yang dikeluarkan untuk penyediaan barang publik tertentu. Keperluan pemerintah penerima tidak harus sesuai dengan kontribusi pemerintah pusat.
- B. Hibah tidak bersyarat (*unconditional grant*). Hibah tanpa syarat tidak ada pembatasan atas penggunaan dana. Efeknya, transfer *lump sum* kepada pemerintah penerima. Pembasaran utama bagi pemerintah pusat memberikan hibah tidak bersyarat kepada negara bagian atau provinsi dan daerah adalah bahwa hibah tersebut dapat digunakan untuk menyamakan kapasitas fiskal pemerintah lokal yang berbeda untuk menjamin penyediaan minimum atau tingkat pelayanan publik. Dikebanyakan negara, *unconditional grants* adalah transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah sub-nasional (misalnya, Kanada, Australia, Britania Raya, Jepang, Korea, dan lain-lain), sedangkan di Jerman, *equalization grants* dibuat dari negara-negara dengan kapasitas fiskal di atas rata-rata untuk negara bagian dengan kapasitas fiskal di bawah rata-rata. Di negara-negara lain, *equalization grants* tanpa syarat mengambil

bentuk berbagi pendapatan umum. Rumus yang digunakan untuk mengalokasikan *equalization grants* untuk pemerintah subnasional adalah elemen utama dari sistem *grants* (transfer).

Kedua jenis transfer di atas memiliki dampak yang berbeda-beda. Untuk dapat lebih memahami masing-masing dampak yang ditimbulkan oleh kedua jenis transfer tersebut akan diuraikan dengan bantuan kurva penjelas seperti berikut ini (Shah, 2006:2–8):

Transfer Tujuan Umum

Transfer tujuan umum disediakan oleh pemerintah pusat sebagai dukungan anggaran pelaksanaan otonomi daerah untuk kegiatan umum tanpa ada syarat khusus. Transfer tujuan umum pada dasarnya hanya menambah sumber daya penerimaan yang memiliki efek pendapatan, seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.1. Pada mulanya posisi garis anggaran berada pada AB, setelah pemerintah melakukan transfer umum dengan jumlah hibah ($AC = BD$), selanjutnya menciptakan baris anggaran baru CD. Hibah ini dapat dihabiskan pada setiap kombinasi barang publik atau jasa atau digunakan untuk memberikan pajak bantuan kepada warga, maka bantuan umum *nonmatching* relatif tidak mempengaruhi harga (tidak ada efek substitusi).



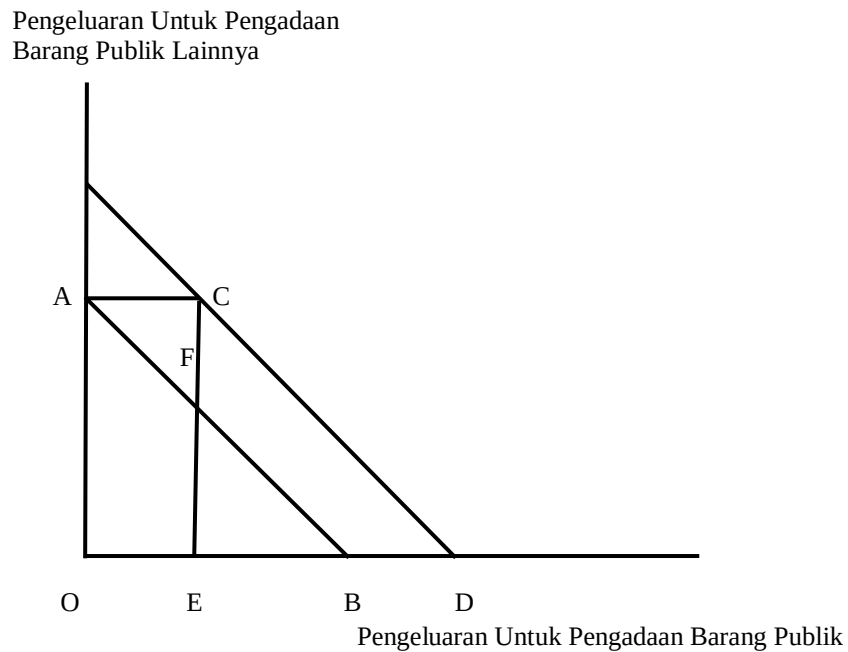
Sumber: Shah, 2007:3

Transfer Tujuan Khusus

Transfer tujuan khusus yang sifatnya bersyarat dimaksudkan untuk memberikan insentif bagi pemerintah daerah untuk melakukan program-program tertentu atau kegiatan khusus. Selain itu hibah tersebut biasa atau wajib dilakukan dalam kondisi darurat. Transfer bersyarat biasanya sudah ditentukan jenis pengeluaran yang akan dibiayai (*input-based*). Selain itu transfer bersyarat juga dapat membutuhkan pencapaian hasil tertentu dalam pemberian layanan (*output-based*). Meskipun pada dasarnya *input-based* sering mengganggu dan tidak produktif, lain halnya *output-based* dapat memajukan tujuan pemberian hibah terutama memperkuat pelaksanaan otonomi daerah. Transfer bersyarat dapat memasukkan ketentuan dengan mewajibkan bagi daerah penerima untuk membiayai persentase tertentu dari pengeluaran dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri. Transfer bersyarat pada dasarnya terdiri dari *nonmatching transfer* dan *matching transfer*.

Transfer bersyarat *nonmatching* memberikan dana dengan syarat tingkat tertentu tanpa melakukan pencocokan kebutuhan daerah. Gambar 2.2 memperlihatkan efek transfer *nonmatching* bersyarat, dimana dana yang dihabiskan untuk keperluan tertentu atau hibah sebesar AC, hal ini akan mengakibatkan garis anggaran mengalami pergeseran dari AB ke ACD, setidaknya luas OE sama dengan luas AC akan diperoleh dari bantuan pengadaan barang publik. Hibah *nonmatching* bersyarat paling cocok digunakan untuk subsidi kegiatan yang dianggap oleh pemerintah pusat sangat prioritas, tetapi bagi pemerintah daerah bukan merupakan prioritas. Hal ini mungkin terjadi jika suatu program dianggap oleh pemerintah pusat menghasilkan derajat *spill-overs* yang tinggi sampai penyediaan ke tingkat tertentu (OE), setelah itu manfaat eksternalnya terhenti tiba-tiba.,

Gambar 2.2.
Effek Transfer Nonmatching Bersyarat

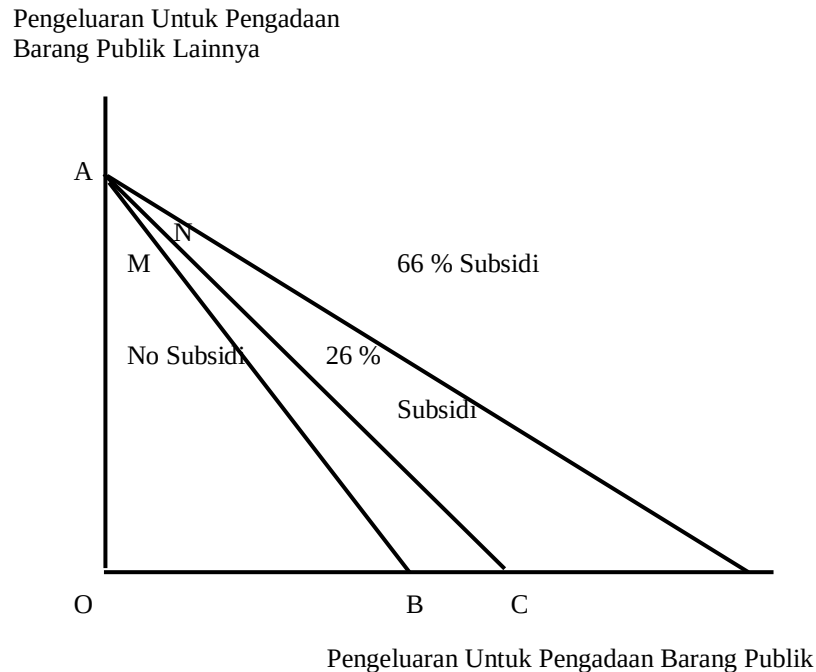


Sumber: Shah, 2007:5

Transfer atau hibah *matching* bersyarat, atau biaya-*sharing* program, mengharuskan dikeluarkan dana untuk tujuan khusus, dan bagi daerah penerima harus turut pula mengeluarkan dana sesuai dengan derajat atau jumlah tertentu. Gambar 2.3 menunjukkan efek penganggaran dari pemerintah daerah sebesar 25 % untuk subsidi program transportasi. Garis AB menunjukkan jika tidak ada subsidi

line-kombinasi transportasi dan barang publik lainnya, dan jasa kota dapat diperoleh dengan anggaran sebesar OA sama dengan OB. Suatu subsidi federal 25 % dari pengeluaran transportasi akan menggeser garis anggaran sehingga dicapai kombinasi untuk garis AC. Pada setiap tingkat barang dan jasa lainnya, masyarakat dapat memperoleh lebih dari sepertiga layanan transportasi. Jika masyarakat memilih kombinasi M sebelum ada hibah, kemungkinan akan memilih kombinasi seperti N sesudahnya, dimana transportasi yang diperoleh lebih dari N.

Gambar 2.3.
Effect of Open-Ended Matching Grant



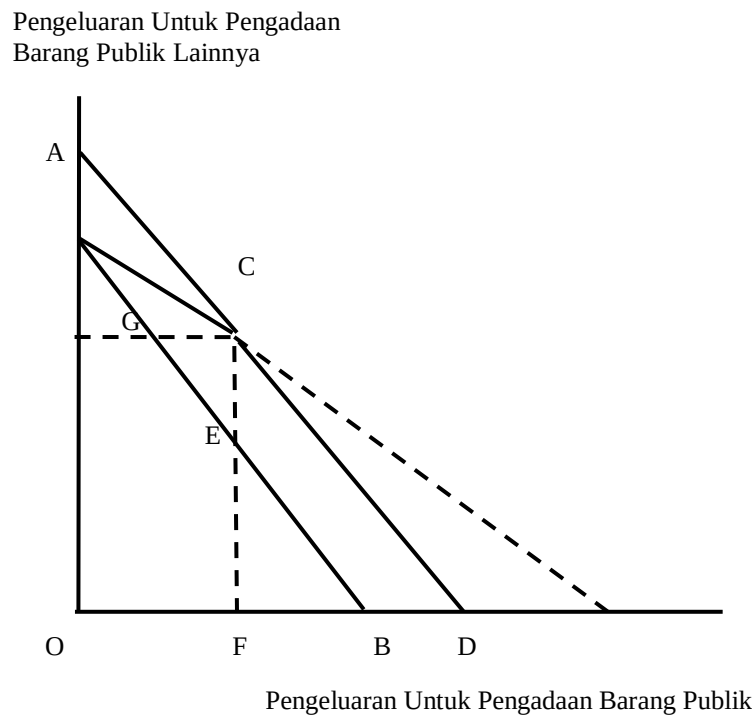
Sumber: Shah, 2007:5

Subsidi ini memiliki dua efek, efek pendapatan dan efek substitusi. Memberikan subsidi kepada masyarakat yang banyak sumber daya, beberapa di antaranya memperoleh layanan transportasi yang lebih baik (efek pendapatan), karena subsidi relatif mengurangi harga/biaya pelayanan transportasi, dan masyarakat memperoleh layanan transportasi yang lebih dari anggaran yang diberikan (substitusi efek). Selanjutnya pendonor atau pemberi biasanya lebih suka model transfer *closed ended matching*, dimana dana disediakan dengan batas tertentu, disamping itu transfer tersebut memungkinkan mereka untuk mempertahankan kontrol atas penggunaan anggaran.

Gambar 2.4 menunjukkan efek transfer *closed ended matching* pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). AB adalah garis anggaran semula, ketika pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp. 1 yang tersedia untuk setiap Rp. 3 dari dana pemerintah daerah selanjutnya garis anggaran menjadi ACD. Awalnya, biaya dibagi sepertiga sampai ke tingkat dimana batas subsidi CG sama dengan CE tercapai. Pengeluaran diluar OF menerima subsidi tidak ada, sehingga

kemiringan garis anggaran kembali menjadi 1:1 daripada 1:3 sepanjang segmen bersubsidi, AC.

Gambar 2.4.
Effect of Closed-Ended Matching Grant



Sumber: Shah, 2007:8

Berdasarkan beberapa uraian di atas, dengan melihat kondisi pelaksanaan desentralisasi fiskal yang di dalamnya mengaitkan model-model transfer sebagai perwujudan dari hubungan *intergovernmental fiscal*. Dimana pelaksanaan desentralisasi fiskal yang sudah diterapkan sejak tahun 2001, akan tetapi sistem transfer antarpemerintah tidak mengalami perubahan secara mendasar dari sistem sebelumnya, dengan mengacu pada konsep transfer yang ada. Model transfer bila dikelompokkan terdiri dari dua kelompok, yaitu; *block-grant* dan *specific-grant*. Prud'homme (1995:204) menyebutkan bahwa *block grant* hanya menghasilkan *income effect*, sedangkan *specific grant* juga menghasilkan *subtitution effect* dan *price effect*.

Pada masa lalu *block-grant* merefleksikan Sumbangan Daerah Otonom (SDO), sementara dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah disebut Dana

Alokasi Umum (DAU) yang realitasnya sebagian besar digunakan untuk membiayai gaji pegawai. Sebagian lagi penggunaannya diserahkan kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikannya, karena itu DAU merupakan bentuk transfer tak bersyarat. Sedangkan *Specific-grant* merefleksikan Dana Inpres, sekarang disebut sebagai Dana Alokasi Khusus (DAK) penggunaannya sudah ditentukan dengan tujuan khusus yang disebut sebagai transfer bersyarat.

2.3. Transfer Antar Tingkat Pemerintah di Indonesia

Merujuk konsep *intergovernmental fiscal transfer* di atas, dan melihat kenyataan yang ada bahwa kondisi daerah otonom sangat berbeda, karena itu diperlukan formulasi yang tepat sebelum melakukan transfer. Salah satu dasar untuk menentukan besarnya transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah adalah kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) yang dialami oleh daerah-daerah. *Fiscal gap* merupakan selisih dari kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal pada daerah tersebut.

- a) Kebutuhan fiskal (*fiscal needs*), yaitu kebutuhan daerah untuk membiayai semua pengeluarannya dalam rangka menjalankan fungsi/kewenangan daerah dalam menyediakan pelayanan publik. *Fiscal needs* suatu daerah dipengaruhi oleh berbagai variabel antara lain; Jumlah penduduk, total area, kondisi geografis dan jumlah penduduk miskin. Jika suatu daerah memiliki jumlah penduduk yang besar, area yang luas. Kondisi geografis yang sulit serta banyak penduduk miskin maka akan mendapatkan DAU dalam jumlah yang besar. Jumlah penduduk dan luas wilayah dapat diketahui secara pasti, sedangkan untuk kondisi geografis didekati dengan indek konstruksi dan jumlah penduduk miskin didekati menggunakan konsep kemiskinan dengan ukuran *poverty line* (Dartanto & Brodjonegoro, 2003:20). Musgrave & Musgrave (1989) merumuskan tentang kebutuhan fiskal= N_j dalam suatu daerah yurisdiksi j adalah:

$$N_j = n_s Z_j \quad (1)$$

Sementara itu formulasi kebutuhan fiskal yang digunakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk melakukan transfer ke daerah yaitu:

$$KbF = TBR (\alpha_1 IP + \alpha_2 IW + \alpha_3 IPM + \alpha_4 IKK + \alpha_5 IPDRB/kap) \quad (2)$$

Dimana:

TBR = Total Belanja Rata-Rata APBD

IP = Indeks Jumlah Penduduk

IW = Indeks Luas Wilayah

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

IKK = Indeks Kemahalan Konstruksi

IPDRB/kap = Indeks Produk Domestik Regional Bruto per kapita

α = Bobot Indeks

- b) Kapasitas fiskal (*fiscal capacity*), adalah kemampuan pemerintah daerah untuk menghimpun keuangan berdasarkan sumber-sumber yang dimilikinya. *Fiscal capacity* relatif lebih mudah diukur, kemampuan fiskal ini diukur berdasarkan:

PDRB, potensi industri (diukur dengan PDRB sektor non-primer), potensi sumber daya alam (diukur dengan PDRB sektor primer) dan potensi sumber daya manusia (diukur dengan angkatan kerja). Daerah yang memiliki PDRB yang tinggi, aktivitas industri dan jasa yang besar, kaya sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas akan menerima DAU yang relatif kecil (Dartanto & Brodjonegoro, 2003:20). Musgrave dan Musgrave (1989) merumuskan konsep pendekatan yang menunjukkan posisi fiskal suatu wilayah yurisdiksi adalah:

$$C_j = t_s B_j \quad (3)$$

Sedangkan formulasi yang digunakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yaitu;

$$KpF = PAD + DBH Pajak + DBH SDA \quad (4)$$

Dimana:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DBH Pajak = Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Pajak

DBH SDA = Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Sumber Daya Alam

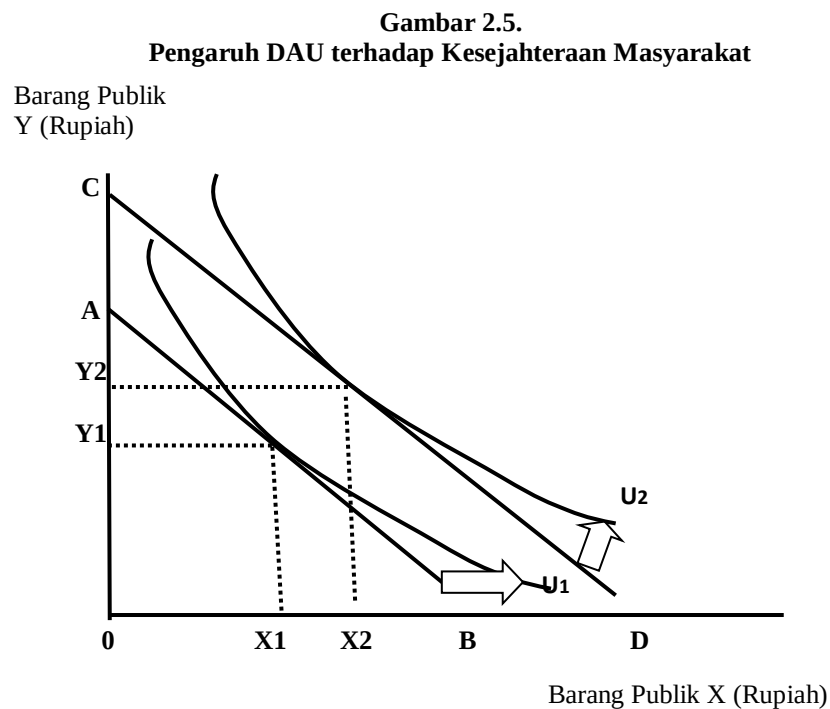
Perimbangan keuangan pusat dan daerah (PKPD) yang merupakan penjabaran dari *intergovernmental fiscal transfer* dalam rangka desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa kepada daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Kewenangan sendiri dibakukan pada wadah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedangkan perimbangan keuangan sebagaimana diketahui, terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Menurut Davey (1988:183) secara umum dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (PKPD) terdiri dari bantuan umum (*block grant*) dan bantuan khusus (*specific grant*). Bentuk bantuan sebelum pelaksanaan desentralisasi fiskal tahun 2001 *block grant* berbentuk sumbangan daerah otonom (SDO), sementara *specific grant* berbentuk Inpres (Devas, 1989:48). *Block grant* digunakan untuk tujuan umum penggunaannya sesuai pedoman pusat, dan bantuan khusus (*specific grant*) yang digunakan untuk pengeluaran yang telah ditentukan dan dikontrol secara detil oleh pusat (Shah, 1998:171). Sementara bantuan (transfer) dalam konteks pelaksanaan desentralisasi fiskal, *block grant* terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, dan *specific grant* yaitu Dana Alokasi Khusus kedua bentuk bantuan tersebut merupakan dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Penggunaan DAU, DBHP dan DBHSDA (*block grants*) diserahkan pada kebijakan masing-masing daerah. Sedangkan penggunaan DAK (*specific grants*) telah ditentukan oleh pemerintah pusat dengan kewajiban daerah penerima harus menyediakan 10 % dana pendamping.

Dalam konteks demikian, bagi daerah penerima akan lebih menyukai transfer dalam bentuk DAU dibandingkan dengan bentuk transfer lainnya. Ini tidak lain karena pemanfaatan DAU, daerah diberikan kebebasan untuk mengalokasikan sesuai dengan preferensi mereka dan skala prioritas di daerah, tanpa ada intervensi dari pemerintah pusat. Dengan demikian asumsinya daerah penerima akan lebih mudah mencapai tingkat kesejahteraan dan kemakmuran

yang optimal. Hal ini terjadi karena daerah yang lebih memahami apa yang menjadi kebutuhannya.

Kustituantanto dan Yansekardias (2001) memberikan ilustrasi secara grafis pengaruh DAU terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti Gambar 2.5 berikut ini:



Sumber : Kustituantanto & Yansekardias, 2001:224

Misalkan daerah penerima memiliki preferensi untuk mengalokasikan dananya untuk barang/jasa publik X dan barang/jasa publik Y. Diasumsikan dari sisi kuantitasnya, kedua barang/jasa publik belum menjangkau semua lapisan masyarakat, akan tetapi kedua jenis barang ini sama pentingnya bagi daerah tersebut. Pada kurva ini ditunjukkan tingkat kesejahteraan optimal masyarakat ditunjukkan oleh persinggungan kapasitas fiskal oleh garis anggaran (*budget line*) AB dengan kurva indifferen U1, yaitu dengan jumlah barang/jasa publik X yang dihasilkan sebesar OX1 dan harga barang/jasa publik Y sebesar OY1.

Jika dilakukan transfer DAU akan menyebabkan kapasitas fiskal daerah bertambah (garis anggaran bergeser) dari AB bergeser ke CD. Bantuan tersebut

akan dioptimalkan penggunaannya pada kombinasi penyediaan barang/jasa publik (*the least-cost combination*) yang mungkin dapat dicapainya. Kombinasi barang/jasa publik yang dihasilkan setelah menerima transfer sebesar 0X2 dan 0Y2 masing-masing untuk barang/jasa publik X dan Y. Tingkat penyediaan optimal dicapai pada titik pada titik singgung antara garis anggaran CD dengan kurva indifferen U2. Transfer batuan umum tersebut mempunyai beberapa implikasi, yaitu; 1) Tidak memiliki pengaruh terhadap harga (*price effect*), tetapi berpengaruh terhadap penerimaan (*income effect*), 2) Ada dampak lanjutan dari peningkatan pendapatan yang disebut *flypaper effect*, yaitu pengeluaran daerah relatif lebih besar dibanding dengan kapasitas fiskal yang sesungguhnya dimiliki daerah tersebut.

Sidik (2002:7), Simanjuntak (2003:16), LPEM FEUI (2003:1) kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai tujuan utama untuk memperkuat kondisi fiskal daerah dan mengurangi ketimpangan antar daerah (*horizontal imbalance*). Karena itu alokasi transfer dana (DAU) dilakukan berbeda, daerah yang mempunyai kapasitas fiskal besar akan mendapat kucuran dana yang lebih kecil daripada daerah yang kapasitas fiskalnya kecil. Pemberian transfer ini bertujuan untuk menjamin tercapainya standar pelayanan publik dan mengurangi kesenjangan horizontal (antar daerah) dan kesenjangan vertikal (pusat-daerah). Aspek pertumbuhan ekonomi daerah menjadi faktor penting untuk menentukan besarnya transfer pemerintah pusat kepada daerah.

Terkait dengan pertumbuhan, daerah-daerah yang mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seharusnya mendapatkan alokasi DAU yang lebih kecil. Namun demikian, meskipun konvergensi antar daerah mampu teratasi (dengan adanya transfer DAU), kinerja pemerintah daerah bisa jadi berbeda. Daerah yang mempunyai tingkat pertumbuhan lebih baik relatif mempunyai tingkat kesiapan yang lebih baik pula untuk menghadapi desentralisasi. Pengalaman dan kapabilitas dalam pengelolaan keuangan menjadi modal dasar yang kuat untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam era desentralisasi fiskal.

Sedangkan DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan anggaran pemerintah pusat dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu

pendanaan, juga kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Namun demikian, DAK yang merupakan hibah sifatnya spesifik pada kenyataannya tidak lebih spesifik daripada DAU itu sendiri. Selain itu, efektivitas mekanisme alokasi hibah khusus misalnya untuk pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, mengatasi pengangguran, dan beberapa indikator tertentu belum memenuhi kondisi yang diinginkan. Hal ini diperkuat oleh studi empiris yang dilakukan oleh Wibowo, *et. al* (2011) dimana alokasi DAK yang digunakan untuk program investasi publik belum mampu memenuhi tujuan pembangunan ekonomi jangka panjang, atau pola dan besaran alokasi DAK diterapkan selama bertahun-tahun, tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap tujuan (hasil dan dampak) dari pembangunan nasional. Ini berarti bahwa secara khusus, DAK terbukti tidak jauh lebih spesifik daripada DAU. Oleh sebab itu mekanisme transfer DAK perlu diperbaiki dengan bersifat *bottom-up* atau inisiatif dari pemerintah daerah sendiri.

2.4. Teori Transfer dan Alokasi Dana Desa

Perimbangan keuangan pusat dan daerah atau transfer antar tingkat pemerintah (*intergovernmental fiscal transfers*) merupakan salah satu bentuk hubungan yang umum dilaksanakan di banyak negara. Transfer fiskal antar tingkat pemerintahan terdiri atas hibah (*grants*), dan bagi hasil (*revenue-sharing*) merupakan sumber penerimaan yang paling dominan bagi tingkat pemerintahan daerah di banyak negara sedang berkembang. Oleh karena transfer tersebut memiliki pengaruh terhadap efisiensi dan keadilan atau pemerataan penyediaan barang publik dari pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka secara garis besar ada jenis transfer yang diberlakukan dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, yakni transfer tujuan umum dan transfer tujuan khusus. Kedua jenis transfer ini memiliki tujuan dan dampak yang berbeda, transfer tujuan umum disediakan oleh pemerintah pusat sebagai dukungan anggaran pelaksanaan otonomi daerah untuk kegiatan umum tanpa ada syarat khusus. Transfer tujuan umum pada dasarnya hanya menambah sumber daya penerimaan yang memiliki efek pendapatan. Transfer

tujuan khusus yang sifatnya bersyarat dimaksudkan untuk memberikan insentif bagi pemerintah daerah untuk melakukan program-program tertentu atau kegiatan khusus. Selain itu hibah tersebut biasa atau wajib dilakukan dalam kondisi darurat. Transfer bersyarat biasanya sudah ditentukan jenis pengeluaran yang akan dibiayai (*input-based*). Selain itu transfer bersyarat juga dapat membutuhkan pencapaian hasil tertentu dalam pemberian layanan (*output-based*).

Berdasarkan beberapa uraian di atas, dengan melihat kondisi pelaksanaan desentralisasi fiskal yang di dalamnya mengaitkan model-model transfer sebagai perwujudan dari hubungan *intergovernmental fiscal*. Dimana pelaksanaan desentralisasi fiskal yang sudah diterapkan sejak tahun 2001, akan tetapi sistem transfer antarpemerintah tidak mengalami perubahan secara mendasar dari sistem sebelumnya, dengan mengacu pada konsep transfer yang ada. Model transfer bila dikelompokkan terdiri dari dua kelompok, yaitu; *block-grant* dan *specific-grant*. Prud'homme (1995) menyebutkan bahwa *block grant* hanya menghasilkan *income effect*, sedangkan *specific grant* juga menghasilkan *substitution effect* dan *price effect*.

Pada masa lalu *block-grant* merefleksikan Sumbangan Daerah Otonom (SDO), sementara dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah disebut Dana Alokasi Umum (DAU) yang realitasnya sebagian besar digunakan untuk membiayai gaji pegawai. Sebagian lagi penggunaannya diserahkan kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikannya, karena itu DAU merupakan bentuk transfer tak bersyarat. Sedangkan *Specific-grant* merefleksikan Dana Inpres, sekarang disebut sebagai Dana Alokasi Khusus (DAK) penggunaannya sudah ditentukan dengan tujuan khusus yang disebut sebagai transfer bersyarat.

Sejak tahun 2015, jenis transfer ke daerah bertambah selain Dana Otonomi Khusus yang diperuntukkan ke Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat, yakni Transfer Dana Desa sebagai konsekuensi lahirnya UU No. 6 Tahun 2014. Jika dilihat dari kriteria dan jenis transfer maka transfer Dana Desa (DD) termasuk dalam jenis transfer dengan tujuan umum karena sifatnya *unconditional*. Demikian juga peruntukannya tidak dirinci oleh pemerintah pusat, hanya dijelaskan bahwa Dana Desa digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan

Desa dengan prioritas untuk mendukung program pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Apabila mengacu pada UU tersebut, Dana Desa memiliki formulasi perhitungan lebih mirip dengan DAU, adapun formulasi perhitungan ADD sebagai berikut:

$$ADD_i = ADR + (BD_i \times ADV) \dots\dots\dots (5)$$

Keterangan :

ADD_i = Besaran ADD setiap Desa

ADR = Alokasi ADD dibagi rata (60%)

BD_i = Jumlah bobot Desa

ADV = Alokasi ADD berdasarkan perhitungan variabel/proporsional (40%)

Sementara Alokasi Dana Desa berdasarkan perhitungan bobot variabel (BD_i) sebagai berikut: Luas wilayah Desa (20%), Jumlah Penduduk Desa (30%), Angka kemiskinan desa (50%) dan Tingkat Kesulitan Geografis Desa (berdasarkan Indeks Kesulitan Geografis Desa/IKG dari Kantor BPS Pusat) sebagai pengali/penyesuaian. Formula ini digunakan untuk menghindari terjadinya ketimpangan antar desa, baik dalam satu kabupaten maupun antar kabupaten atau provinsi. Tentu saja bahwa formula ini akan menghasilkan pembagian ADD setiap desa berbeda jumlah yang didapatkan, karena masing-masing desa memiliki bobot yang berbeda dan jenis kebutuhannya.

2.5. Teori Ketimpangan

Menurut Lessmann (2009), untuk mengukur ketimpangan antar daerah (*interregion*) dalam suatu negara ada tiga jenis pengukuran, yaitu; 1) Indikator ekonomi, yang umumnya menggunakan PDB, 2) Tingkat teritorial, untuk negara-negara Eropa umumnya menggunakan ukuran statistik unit teritorial dan di luar Eropa menggunakan ukuran perbedaan daerah, dan 3). Pengukuran konsentrasi yang biasanya menggunakan koefisien variasi, koefisien gini dan koefisien *weighted-population*. Guna keperluan penelitian ini, maka ukuran ketimpangan yang dijadikan rujukan adalah gini rasio yang selama ini banyak digunakan oleh BPS. Wodon dan Yitzhaki (2002) mengungkapkan kelebihan utama gini rasio, yaitu; 1) Sebagai ukuran statistik untuk variabilitas, gini rasio bisa digunakan untuk menghitung pendapatan negatif, ini adalah salah satu sifat yang tidak

dimiliki oleh sebagian ukuran ketimpangan, 2) Gini rasio juga dapat digambarkan secara geometris sehingga lebih mudah untuk diamati dan dianalisis, 3) Gini rasio memiliki dasar teori yang kuat sebagai ukuran normatif, gini rasio bisa mempresentasikan teori kemiskinan relatif, gini rasio juga dapat diturunkan sebagai ukuran ketimpangan berdasarkan aksioma-aksioma keadilan sosial.

Kaitannya dengan pengukuran ketimpangan wilayah, menurut Akita *et.al.* (2011) manakala hendak mengukur ketimpangan maka ada tiga jenis model pengukuran yang berbeda, diantaranya; 1) Kesenjangan daerah mengacu pada variasi *unweighted* dalam pendapatan per kapita di sebuah daerah. Tipe ini membandingkan daerah dalam hal pendapatan per kapita, dan mengabaikan ukuran populasinya. 2) Williamson memperkenalkan suatu WCV. Williamson WCV adalah contoh dari jenis kedua ketidaksetaraan (ketimpangan) regional. dan 3) Ketidaksetaraan daerah menggunakan individu sebagai unit analisis dan memperkirakan kontribusi variasi dalam pendapatan per kapita antar daerah, atau antara daerah perkotaan dan pedesaan, untuk variasi pendapatan di semua individu. Ini mempertimbangkan dalam wilayah ketidaksetaraan interpersonal serta ketidaksetaraan antara-daerah.

Mengacu pada teori pengukuran ketimpangan yang dikemukakan di atas, maka beberapa penelitian tentang dana transfer (desentralisasi fiskal, sejenis dengan transfer dana desa) dikaitkan dengan ketimpangan di Indonesia kecenderungannya menunjukkan bahwa dana transfer belum dapat mengurangi ketimpangan. Hasil penelitian Waluyo (2007), Nugrahanto dan Muhyiddin (2008), Widhiyanto (2008), Suwanan dan Sulistiani (2009) kesimpulannya secara umum sama bahwa kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia dalam bentuk transfer belum mampu mengurangi ketimpangan. Temuan tersebut sejalan dengan beberapa penelitian serupa yang dilakukan di negara lain, diantaranya Bonet (2006) di Kolombia, Liu *et. al* (2014) di China, Yeeles (2015) di Filipina, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa transfer fiskal justru cenderung meningkatkan ketimpangan pendapatan. Tetapi berbeda halnya yang ditemukan oleh Wardana *et. al* (2013), dimana transfer fiskal dapat menurunkan ketimpangan di Indonesia, demikian juga Munoz *et. al* (2010) di Amerika Latin dan Karibia. Sedangkan Kim

dan Samudro (2017) dalam studinya menemukan bahwa peningkatan transfer fiskal ke daerah kaya di Indonesia justru meningkatkan ketimpangan dan sebaliknya peningkatan transfer di daerah miskin akan mengurangi ketimpangan.

Jika melihat perkembangan selama ini, rata-rata tingkat ketimpangan di beberapa provinsi di Indonesia termasuk kategori tinggi. Cukup banyak kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong penurunan ketimpangan, termasuk dana transfer akan tetapi tidak terlalu signifikan pengaruhnya. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, penurunan disparitas pendapatan faktor pertumbuhan ekonomi tidak dapat diabaikan karena keduanya saling mempengaruhi. Ketimpangan mempengaruhi pertumbuhan, dan sebaliknya pertumbuhan mempengaruhi ketimpangan (Barro, 1990; Svedberg, 2002; Bourguignon, 2004). Pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas tentu tidak memberikan manfaat terhadap perbaikan ketimpangan, argumentasinya adalah pertumbuhan ekonomi menyebabkan setiap kelompok dalam masyarakat memperoleh keuntungan, namun kelompok yang menguasai faktor produksi dan modal biasanya mendapatkan keuntungan yang relatif lebih besar dibandingkan dengan kelompok lainnya (Dollar dan Kraay, 2002; Son dan Kakwani, 2003).

BAB 3

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1. Tujuan Penelitian

Sementara penelitian ini tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk melakukan analisis pengaruh transfer Dana Desa terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia.
2. Untuk melakukan analisis pengaruh Dana Desa terhadap kemiskinan perdesaan di Indonesia.

3.2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dalam penelitian ini, memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Menjadi masukan kepada pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten), maupun masyarakat dan *stakeholders* lainnya dalam melaksanakan perencanaan dan pemanfaatan Dana Desa yang memiliki implikasi langsung terhadap penurunan ketimpangan distribusi pendapatan.
2. Sebagai bahan referensi bagi pemerintah pusat untuk melakukan transfer ke daerah (Dana Desa), dan penataan pembiayaan desa bagi pemerintah desa acuan untuk merumuskan pengelolaan keuangan desa terutama pada penetapan belanja yang memiliki implikasi terhadap penurunan kemiskinan perdesaan di seluruh provinsi di Indonesia.

BAB 4

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data

3.1.1. Data Primer:

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi langsung dengan pihak yang berkepentingan, seperti Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta pihak pemerintah provinsi yang termasuk daerah yang paling tinggi tingkat ketimpangan dan kemiskinannya. Kegiatan wawancara dilakukan untuk mengetahui secara mendalam kondisi daerah yang dijadikan sampel.

3.1.2. Data Sekunder:

Data yang digunakan dalam studi ini merupakan data sekunder. Sumber perolehan data adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dari Kementerian Keuangan untuk data Dana Desa (DD) dan Daerah Dalam Angka seluruh Provinsi di Indonesia dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk data makro ekonomi daerah, dan keseluruhan data tersebut merupakan data kuantitatif, dengan periode waktu 2015 – 2017. Unit analisis dalam penelitian ini adalah 33 provinsi di Indonesia, Jakarta tidak dimasukkan sebagai unit analisis karena karakteristik ekonominya berbeda dengan provinsi lainnya.

3.2. Spesifikasi Model

Untuk $T + 1$ menggunakan persamaan identitas terdiri dari variabel ketimpangan distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, jumlah populasi, tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran dan Alokasi dana Desa setiap provinsi untuk tahun pertama ($T + 1$). Model transfer DD terhadap ketimpangan digunakan dalam studi ini mengikuti model dasar dari Lessmann (2009), sebagai berikut :

Relasi antara Alokasi Dana Desa dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan

$$\begin{aligned} Ineq_{it} = & \alpha_0 + \alpha_1 Growth_{it} + \alpha_2 LnPop_{it} + \alpha_3 Pov_{it} + \alpha_4 HDI_{it} + \alpha_5 Unemp_{it} + \\ & \alpha_6 LnDD_{it} + \varepsilon_{it} \end{aligned} \quad (6)$$

Dimana, INEQ adalah Kesenjangan Distribusi Pendapatan Dikalkulasikan dari Gini Rasio (Indeks); Growth, Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Provinsi (Persen); POP, Jumlah penduduk (Jiwa); POV, Tingkat Kemiskinan (Persen), HDI; Indeks Pembangunan Manusia (Indeks); UNEMP, Angka Pengangguran (Persen), dan DD, Dana Desa (Rupiah), dan ε Error term.

3.3. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Pendekatan yang digunakan untuk mengestimasi parameter model ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan adalah pendekatan data panel. Hasil pengujian pemilihan teknik dalam pengolahan data panel telah dilakukan pengujian statistik melalui uji Hausman dan uji Chow. Berdasarkan hasil uji Hausman dan uji Chow, model yang tepat digunakan untuk kedua persamaan, yaitu ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan antar-provinsi adalah pendekatan *fix effect*, dengan melakukan pembobotan melalui *coefficient covariance white cross section method*. Selanjutnya dilakukan pengujian statistik untuk melihat *goodness of fit* dengan melihat nilai (R²), nilai F-test, F-test dan t-test (untuk uji parsial). Selain itu dilakukan uji ekonometrika, yaitu uji validitas model atau ketepatan model, yakni digunakan uji asumsi regresi klasik (*classical regression linier model*), untuk memperoleh penduga yang bersifat *Best, Linear, Unbiased Estimator (BLUE)*, atau terbebas dari pelanggaran asumsi klasik, yaitu multikolonieritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas.

BAB 5

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

5.1. Hasil dan Pembahasan

Model pendekatan yang diestimasi adalah faktor-faktor pertumbuhan ekonomi (Growth), Jumlah Populasi (Pop), Kemiskinan (Pov), Indeks Pembangunan Manusia (HDI), Tingkat Pengangguran (Unemp), dan Dana Desa (DD) terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan (Ineq). Alat analisis yang digunakan adalah ekonometrika melalui pendekatan panel data, kemudian pemilihan teknik dalam pengolahan data panel dilakukan pengujian statistik melalui uji Hausman. Hasil uji hausman menunjukkan dimana p-value sebesar 0,7122 lebih besar dari 5 % dapat disimpulkan bahwa model efek tetap (*fix effect*) lebih baik dibanding dengan model efek random (*random effect*).

Tabel 1. Hasil Uji Hausman (*Hausman Test*)

Correlated Random Effects – Hausman Test			
Pool: INEQUALITY			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	3.737286	6	0.7122

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017

Langkah selanjutnya dilakukan pengujian asumsi klasik, yakni multikolonieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Pengujian multikolonieritas menggunakan VIF, jika nilai VIF semakin membesar maka diduga ada multikolonieritas, *rule of thumbs* tidak melebihi angka 10. Dari perhitungan VIF, didapatkan nilai sebesar 1,96 lebih kecil dari 10 sehingga diduga tidak ada multikolonieritas. Sedangkan pengujian heteroskedastisitas menggunakan metode Glesjer karena lebih sederhana dan mudah dilakukan, hasil pengujian menunjukkan bahwa F-stat sebesar -1,88 dengan demikian lebih kecil dari F-tabel sehingga diduga tidak ada heteroskedastisitas. Untuk pengujian autokorelasi menggunakan metode Durbin-Watson, apabila *d* berada diantara 1,54 dan 2,46 maka tidak ada autokorelasi dan bila *d* ada diantara 0 hingga 1,10 dapat

disimpulkan bahwa data mengandung autokorelasi positif. Hasil perhitungan menunjukkan nilai DW sebesar 1,995 dengan demikian berada diantara 1,54 dan 2,46 berarti diduga tidak ada autokorelasi.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	INEQ?	GROWTH?	LOG(POP?)	POVERTY?	HDI?	UNEMP?	LOG(DD?)
Mean	0.313121	5.290303	15.21524	14.30015	68.55212	5.448788	20.29357
Median	0.309500	5.265000	15.12384	12.20000	69.09000	5.040000	20.28374
Max	0.461000	15.52000	17.67370	37.94000	78.38000	9.930000	22.33319
Min	0.239000	-1.280000	13.37224	5.060000	57.25000	1.890000	18.18748
Std.Dev.	0.040853	2.309979	1.028510	8.016778	3.768126	2.010497	0.965975
Skewness	0.841372	0.526982	0.632796	1.509745	-0.371759	0.487064	0.097023
Kurtosis	4.389715	9.212638	3.157709	4.944648	4.470192	2.470819	2.570676
Jarque-Bera	13.09807	109.1962	4.473143	35.47217	7.464278	3.379634	0.610426
Prob.	0.001431	0.000000	0.106824	0.000000	0.023942	0.184553	0.736966
Sum	20.66600	349.1600	1004.206	943.8100	4524.440	359.6200	1339.375
Sum Sq.Dev	0.108481	346.8402	68.75912	4177.467	922.9201	262.7363	60.65205
Obs	66	66	66	66	66	66	66

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017

Pengujian secara serempak menunjukkan bahwa kebijakan transfer Dana Desa berpengaruh terhadap penurunan ketimpangan distribusi pendapatan perdesaan di Indonesia, dan perubahan koefisien determinasi menunjukkan bahwa model ini mampu dijelaskan sebesar 99,66 persen, dan selebihnya dijelaskan variabel yang tidak termasuk dalam persamaan yang disusun. Selanjutnya, dilakukan evaluasi model dengan kriteria ekonomi terlihat tanda dan besaran nilai koefisien dari variabel bebas, dan nampak bahwa tidak semua arah koefisien sesuai teori. Hasil estimasi parameter-parameter dapat disimak pada tabel 2.

Tabel 3: Ringkasan Hasil Estimasi Persamaan Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Variabel	Koefisien	t-Stat
Ineq	-	-
C	-5.978002	-4.036060
Growth	-0.000197	-0.282991
LnPop	0.319795	3.901678***
Pov	-0.001331	-1.333742
HDI	0.029762	4.324015***
Unemp	0.003290	3.618162***
LnDD	-0.030194	-4.442512***
Adj. R-Squared	0.996605	
F – Stat	503.0747	
DW- Stat	1.995344	

Keterangan : Signifikan *) 10 %, **) 5 % dan ***) 1 %.

Sumber: Hasil Pengolahan Data, (2017)

Berdasarkan hasil estimasi model persamaan menunjukkan bahwa faktor pertumbuhan ekonomi tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, berbeda dengan yang dikemukakan oleh Bourguignon (2004) dimana pertumbuhan dapat mempengaruhi ketimpangan atau keduanya berhubungan satu sama lain. Sementara jumlah penduduk atau faktor demografi disetiap provinsi berpengaruh positif, bilamana terjadi penambahan jumlah penduduk sebesar 10 persen akan meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan, temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Arham (2014b) bahwa dengan kenaikan jumlah populasi menciptakan ketimpangan. Jumlah penduduk yang bertambah asumsinya tidak dibarengi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan dan produktifitas relatif rendah. Selain itu beberapa ekonom mengasumsikan bahwa penambahan jumlah penduduk cenderung meningkatkan ketimpangan karena akan bertambah pengeluaran pemerintah untuk pengadaan barang publik, ketersediaan barang publik lebih banyak dinikmati oleh kelompok menengah ke atas. Sejalan dengan itu, ketimpangan meningkat karena faktor demografi tidak lain karena struktur ekonomi sektor pertanian dominan memberi kontribusi rata-rata diatas 50 persen. Namun produktifitasnya rendah luas lahan pertanian makin menyusut, pada saat yang bersamaan sebagian besar lahan pertanian dikuasai oleh korporasi dan oligarki ekonomi. Tidak kalah krusialnya, dilihat dari sisi peranan sektor pertanian cenderung menurun dan sektor industri

meningkat. Sekilas tergambar transformasi struktur ekonomi di Indonesia telah berjalan, tetapi yang terjadi transformasi ekonomi semu sebab pekerja masih tetap lebih besar disektor pertanian.

Variabel kemiskinan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan, pengalaman di sebagian negara menunjukkan bahwa negara yang menghasilkan PDB besar, pendapatan per kapita yang tinggi, dan distribusi pendapatan relatif merata. Indeks pembangunan manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan, jika terjadi kenaikan IPM setiap tahun akan meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia, terutama diperdesaan. Hasil ini merupakan hal yang tidak diharapkan, idealnya peningkatan indeks pembangunan manusia justru menekan ketimpangan. Meningkatnya ketimpangan distribusi pendapatan karena peningkatan IPM sebagai dampak dari kesenjangan pendidikan dan kesehatan. Menurut Yusuf, Andrew dan Irlan (2013), kesenjangan dalam pendidikan antara kaum miskin dan kaya belum berkurang, terutama dalam kesempatan mengakses pendidikan yang menjamin kehidupan yang lebih baik seperti pendidikan tinggi. Dari segi kesehatan, situasi yang serupa juga terjadi. Akses terhadap air bersih mengalami peningkatan yang lebih cepat untuk rumah tangga berpenghasilan tinggi, lebih lambat untuk rumah tangga yang pendapatan rendah, sehingga mustahil untuk mengurangi kesenjangan yang ada. Ketidaksetaraan kesempatan merupakan faktor mendasar terjadinya ketimpangan pendapatan dan hasil pembangunan.

Sementara angka pengangguran di setiap provinsi berpengaruh positif, artinya bahwa setiap terjadi kenaikan angka pengangguran akan mengakibatkan kenaikan ketimpangan distribusi pendapatan. Untuk variabel Dana Desa berpengaruh negatif, bila terjadi penambahan transfer Dana Desa sebesar 10 persen untuk setiap provinsi akan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan perdesaan setiap provinsi. Hasil empiris ini sejalan dengan penelitian sebelumnya di Indonesia yang dilakukan oleh Widhiyanto (2008b), Suwanan dan Sulistiani (2009b) bahwa dana transfer fiskal dapat mengurangi ketimpangan. Berbeda halnya penelitian besaran alokasi transfer fiskal tujuan khusus (DAK) tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap tujuan pembangunan nasional

(Wibowo, Dendi dan Zulhanif, 2011), termasuk perbaikan ketimpangan (Huang dan Chen, 2012b). Dengan demikian meningkatnya transfer Dana Desa memberikan peluang bagi pemerintah desa menambah belanja untuk kegiatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat pedesaan itu sendiri. Dengan belanja yang tepat sasaran dipastikan pendapatan masyarakat desa meningkat, dan akan mengurangi tingkat ketimpangan (Siddiqui dan Malik, 2011), (Crudu, 2015).

Agar pemanfaatan dana desa berjalan optimal tentu diperlukan perencanaan yang baik, desa tidak boleh dipandang semata sebagai unit wilayah administrasi terendah dalam hierarki pemerintahan, desa harus dipandang sebagai bagian integrasi perencanaan yang saling memiliki keterkaitan terhadap perencanaan disekitar atau diatasnya. Disinilah pentingnya sinergitas perencanaan dan penganggaran agar tidak saling tumpang tindih antara level pemerintahan dalam membiayai suatu kegiatan yang ada diperdesaan, sehingga pemanfaatan anggaran secara efisien untuk mengurangi ketimpangan dapat terwujud dengan cepat.

Selanjutnya studi ini disadari masih terdapat kekurangan, diantaranya tidak dieksplorasi secara mendalam tentang potensi kebocoran Dana Desa yang dapat menghambat pembangunan perdesaan. Apalagi saat ini sudah ada ratusan kepala desa tersangkut masalah hukum karena adanya penyelewengan Dan Desa, dan triliunan rupiah Dana Desa tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Selain itu variabel Dana Desa semestinya juga penting dilihat efeknya terhadap kemiskinan diperdesaan, sebab bilamana dibandingkan kemiskinan perkotan dan kemiskinan perdesaan lebih tinggi.

5.2. Luara yang Dicapai

Adapun luaran yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

No	Jenis Luaran		Indikator Capaian
1	Publikasi ilmiah	Nasional	<i>Submit</i>
		Internasional	<i>Submit</i>
2	Buku Ajar (ISBN)		Draft

BAB 6

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Rencana kegiatan penelitian tahun ke-2 antara lain

1. Melakukan analisis ekonometrika dan statistika pengaruh transfer dana desa terhadap kemiskinan
2. Melakukan kajian lebih mendalam masalah hambatan dan keberhasilan pelaksanaan transfer dana desa
3. Mendesain model kebijakan pengalokasian dana desa untuk menurunkan angka kemiskinan perdesaan di Indonesia
4. Melakukan desiminasi model kebijakan pemanfaatan dana desa

BAB 7

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil estimasi model dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan;

1. Model kebijakan fiskal yang telah dijalankan oleh pemerintah dalam hal ini transfer Dana Desa dapat menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia dalam dua tahun terakhir. Kebijakan ini tentu sesuai diharapkan sebab selama puluhan tahun wilayah perdesaan perhatian pemerintah minim dalam hal pembiayaan sehingga ketimpangan antar kota-desa makin melebar sehingga memicu urbanisasi. Pada akhirnya beban kota semakin berat, biaya pembangunan konstruksi makin mahal dan menambah kemacetan.
2. Pertumbuhan populasi, Indeks Pembangunan Manusia dan pengangguran diseluruh provinsi mendorong ketimpangan. Hal ini dapat diasumsikan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk diseluruh provinsi meningkatkan usia produktif yang tidak dibarengi dengan ketersediaan lapangan kerja terutama diwilayah perdesaan karena lemahnya pergeseran struktur ekonomi yang tetap didominasi sektor pertanian, pada akhirnya menciptakan pengangguran dan berdampak terhadap distribusi pendapatan.

7.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan di atas, maka disampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Transfer Dana Desa (DD) berpengaruh terhadap penurunan ketimpangan distribusi pendapatan maka pemerintah pusat perlu konsisten meningkatkan Dana Desa sesuai dengan peta jalan yang telah disusun dan bagian dari nawacita pemerintahan yakni membangun dari desa. Sejalan dengan itu pemerintah provinsi dan kabupaten hendaknya terus meningkatkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan melakukan sinkronisasi perencanaan ditingkat desa,

kabupaten dan provinsi sehingga kegiatan pembangunan diperdesaan pembiayaannya tidak *overlapping* agar anggaran lebih efisien dimanfaatkan untuk memperbaiki ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

2. Pemerintah perlu melakukan revisi peraturan tentang pengalokasian Dana Desa, sebab alokasi dasar yang dibagi ratakan ke seluruh desa terlalu besar, sementara alokasi proporsional yang didasarkan pada variabel demografi dan geografi relatif kecil. Hal ini akan menimbulkan persoalan ketimpangan baru antar desa dalam satu kabupaten atau antar desa intra provinsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akai, N. & Sakata, M., (2002). Fiscal Decentralization Contributes to Economic Growth: Evidence From State-Level Cross-Section Data for the United States. *Journal of Urban Economics*, Vol. 52 (1), 93 - 108.
- Akai, N., Hosoi, M. & Nishimura, Y. (2009). Fiscal Decentralization and Economic Volatility; Theory and Evidence from State Level Cross-Section Data for the United States, *Journal Japanese Review*, Vol. 60 (2), 233 – 235.
- Akita, T., Kurniawan, P., & Miyata, S., (2011). Structural Changes and Regional Income Inequality in Indonesia: A Bidimensional Decomposition Analysis. *Asian Economic Journal*, 25 (1), 55 – 77.
- Abimanyu, A. (2000). Meminimumkan Resiko Desentralisasi; Pendekatan Kebijakan Fiskal. Makalah Seminar Menyelamatkan Otonomi Daerah”, Jakarta, KPEN-KADIN-CSIS dan LPEM FEUI.
- Arham, M. A. (2014). Kebijakan Desentralisasi Fiskal, Pergeseran Sektor dan Ketimpangan Antar Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 14 (2), 145 – 167.
- Alisjahbana, A. S. (2000), Desentralisasi Fiskal Dalam Perspektif Daerah Jawa Barat. Makalah disampaikan pada Seminar dan Lokakarya: “Desentralisasi Fiskal di Indonesia” yang diselenggarakan atas kerjasama: Universitas Padjadjaran, IRIS – the University of Maryland, USA, LPEM FE-UI dan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat, Bandung, 29 Juni – 1 Juli, 2000.
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2016, Ringkasan Berita Statistika. Jakarta.
- Kustitunto, B. & Yansekardia. (2001). Analytical Hierarchy Process (AHP: Sebuah Metode Pembobotan Alternatif Dalam Pembagian Dana Alokasi Umum (DAU); Studi Kasus di Provinsi Yogyakarta”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 16 (3), 222 - 234.
- Brodjonegoro, P.S., Hendranata, A. & Riatu, Q. (2001). Model Ekonometrika Desentralisasi Fiskal: Analisa Dampak Alokasi SDA dan DAU Terhadap Pemerataan dan Pertumbuhan Ekonomi Antar Daerah. LPEM FEUI, Jakarta, Paper Seminar.
- Barro, J. R. (1990). Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth. *The Journal of Political Economy*, 98 (5), 103 – 125.
- Barzelay, M. (1991). Managing Local Development, Lesson from Spain. *Journal Policy Sciences*, Vol. 24 (3), 271 – 290.
- Baskaran, T. & Feld, L.P. (2009). Fiscal Decentralization and Economic Growth in OECD Countries: Is there a Relationship?. CESIFO Working Paper No. 2721.

- Bird, R. M., & Vaillancourt, F. (1999). Fiscal Decentralization in Developing Countries: An Overview, In Richard M. Bird and François Vaillancourt, eds. *Fiscal Decentralization in Developing Countries*. Cambridge: Cambridge University Press,.
- Bohte, J. & Meier, K J. (2000). The Marble Cake: Introducing Federalism to the Government Growth Equation. *The Journal of Federalism (Publius Summer)* Vol. 30 (3). 35 – 99.
- Bonet, J. (2006). Fiscal Decentralization and Regional Income Disparities: Evidence from Colombia Experience. *The Annals of Regional Science*, 40 (3), 661 - 676.
- Bourguignon, F. (2004). Poverty-Growth-Inequality Triangle. Paper was presented at Indian Council for Research on International Economic Relations, New Delhi, on February 4, 2004.
- Ananda, C. F. (2002). Problems of the Implementation of Fiscal Decentralization in Regional Autonomy: The Case of Malang Municipality and Trenggalek District. Center for Institutional Reform and the Informal Sector (IRIS), University of Maryland at College Park.
- Checerita, C., Nickel, C., & Rother, P. (2009). The Role of Fiscal Transfers for Regional Economic Convergence in Europe, Working Paper Series 1029, European Central Bank. (Diakses pada tanggal 17 Juli 2017)
- Crudu, R., (2015). The Influence of Fiscal Policy on Income Inequality in European Union's Member States. *Ekonomika Business Systems and Economics*, 5 (1), 46- 60.
- Davey, K. J. (1988). (Terjemahan Masri Maris) Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga, Jakarta, Penerbit UI-Press.
- Davoodi, H. & Zou, Heng-fu. F. (1998). Fiscal Decentralization and Economic Growth: A Cross-Country Study. *Journal of Urban Economics*, Vol. 43 (2), 244 - 257.
- De Mello, L.R. (2000). Fiscal Decentralization and Intergovernmental Fiscal Relations: A Cross-Country Analysis. *Journal World Development*, Vol. 28 (2), 365 – 380.
- Ding, Y 2007. Fiscal Decentralization and Economic Growth in China,1994-2002. *Journal of Chinese Economic and Business Studies*, Vol. 5 (3), 243 - 260.
- Dollar, D. & Kraay, A. (2002). Growth is Good for the Poor. *Journal of Economic Growth*. Vol. 7 (3), 195 – 225.
- Gramlich, E, M. (1993). A Policy Maker's Guide to Fiscal Decentralization. *National Tax Journal* Vol. XLVI (2), 229 – 235.

- Huang, B. & Chen, K. (2012). Are Intergovernmental Transfers in China Equalizing?. *China Economic Review*, Vol. 23 (3), 534 – 551.
- Ismail, A. G. et.al. (2004). Fiscal Decentralization and Economic Growth: Evidence from Selected Muslim Countries. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 9 (2), 109 – 116.
- Jin, Y. & Rider, M. (2010). Mark Fiscal Decentralization, Fiscal Equalization, and Economic Growth: A Comparative Study of China and India. Georgia State University, Working Paper Andrew Young School of Policy Studies.
- Kim, E. & Samudro, Y.N. (2017). The impact of intergovernmental transfer funds on interregional income disparity in Indonesia. *International Journal of Urban Sciences*, Vol. 21 (1), 22 – 40.
- Lessmann, C. (2009). Fiscal Decentralisation and Regional Disparity; Evidence from Cross-Section and Panel Data. *Journal Environment and Planning*, Vol. 41 (41), 2455 – 2473.
- Litvack, J., Ahmad, J. & Bird, R. (1998). Rethinking Decentralization in Developing Countries. The World Bank, Washington.D.C.
- Liu, Y., Martinez-Vazquez, J., dan Wu, A. (2014). Fiscal Decentralization, Equalization, and Intra-Provincial Inequality in China. . International Center for Public Policy Working Paper 14-32, icepp.gsu.edu/files/2015/03/ispwp1432.pdf (Diakses pada tanggal 25 April 2017)
- Ma, J. (1997). Intergovernmental Fiscal Transfer; A Comparison of Nine Countries (Case of United States, Canada, The United Kingdom, Australia, Germany, Japan, Korea, India and Indonesia). The World Bank.
- Sidik, M. (2002). “Format Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah Yang Mengacu Pada Pencapaian Tujuan Nasional. Makalah Pada Seminar Nasional “Public Sector Scorecard.” Jakarta, 17-18 April 2002.
- Sidik, M. (2009). Kebijakan Awal Desentralisasi Fiskal 1999 – 2004 dalam Abimanyu dan Megantara (ed)., Era Baru Kebijakan Fiskal, Jakarta, Penerbit Kompas.
- Mardiasmo. (2009). Kebijakan Desentralisasi Fiskal di Era Reformasi: 2005 – 2008, dalam Abimanyu dan Megantara, (ed): Era Baru Kebijakan Fiskal, Jakarta, Penerbit Kompas.
- Martinez-Vasquez, J. & McNab, R.M. (2003). Fiscal Decentralization and Economic Growth. *Journal World Development*, Vol. 31 (9), 1597 - 1616.
- Munoz, A. F., Radics, G. A. & Bone, C. (2010). Subnational Fiscal Disparities and Intergovernmental Transfers in LAC”. Working Paper, Manuscript 1705.

- www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/.../16-4-2.pdf (Diakses pada Tanggal 25 April 2017).
- Musgrave, R. & Musgrave, P. (1989). *Public Finance in Theory and Practice*, International Edition, Singapore, McGraw-Hill.
- Nugrahanto, A.S. & Muhyiddin. (2008). Fiscal Decentralization and Regional Inequality in Indonesia 2001 – 2004. *Journal of Development Planning*, Vol. 14 (2), 1 – 19.
- Oates, W. (1993). Fiscal Decentralization and Economic Development. *National Tax Journal*, Vol. 46 (2), 237-243.
- Oates, W. E. (1972). *Fiscal Federalism*. New York: Harcourt Brace Jovanovich.
- Prud'homme, R. (1995). The Dangers of Decentralization. *The World Bank Research Observer*, Vol. 10 (2), 201 – 220.
- Raksaka M. (2002). Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah. Makalah disampaikan dalam Kursus Reguler Angkatan XXXV, LEMHANAS, Jakarta, 25 Agustus 2002.
- Simanjuntak, R. (2003). Implementasi Desentralisasi Fiskal; Problema, Prospek dan Kebijakan. LPEM FEUI, Working Paper No.4/2003.
- Rosen, H. (2008). *Public Finance*, 5th edition, Illinois, Richard d. Irvin, Inc.
- Samimi, A. J. et.al. (2010). Fiscal Decentralization and Economic Growth in Iran. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, Vol. 4 (11), 5490 - 5495.
- Shah, A. (1994). The Reform of Intergovernmental Fiscal Relations in Developing and Emerging Market Economics". Washington D.C., The World Bank.
- Shah, A. (1998). Indonesia and Pakistan: Fiscal Decentralization an Elusive Goal? In Bird and Vaillancourt (ed), *Fiscal and Decentralization in Developing Countries*, UK. Cambridge University Press.
- Shah, A. (2006). A Practitioner's Guide to Intergovernmental Fiscal Transfer. World Bank Policy Research Working Paper 4039, October.
- Siddiqui, M. & Malik, A. (2011). Impact of government expenditure on income distribution a theroticle analysis in the case Pakistan. *International Journal of Economics and Management Sciences*, Vol. 1 (1), 87 – 92.
- Son, H. & Kakwani, N. (2003). Poverty Reductio; Do Initials Conditions Matter?. Mimeo, The World Bank.
- Steffensen, J. (2010). *Fiscal Decentralization and Sector Funding Principles and Practices*. Denmark, Danida
- Suwanan, A. F. & Sulistiani, E. H. (2009). Fiscal Decentralization and Regional Disparities in Indonesia; A Dynamic Panel Data Evidence. *Journal of Indonesian Economy dan Business*, Vol. 24 (3), 328 – 336.

- Svedberg, P. (2002). Income Distribution and Growth; The Two-Way Relationship. Retrieved October 20, 2011 from <http://rru.worldbank.org/paperlinks/> (Diakses, 10 April 2017).
- Dartanto, T. & Brodjonegoro, B. P. (2003). Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Daerah: Analisa Model Makro Ekonometrik Simultan”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 10 (1), 17 – 38.
- Tiebout, C. (1956). A Pure Theory of Local Expenditures. *Journal of Political Economy*, Vol. 64 (5), 416 - 424.
- Waluyo, J. (2007). Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antardaerah di Indonesia. UI – Depok, Makalah Panel Discussion, 12 Desember.
- Wardana, A., Juanda, B., Siregar, H., & Wobowo, K. (2013). Dampak Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Penurunan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia. *Sosiohumaniora*, Vol. 15 (2), 111 – 118.
- Wellisch, D. (2004). Theory of Public Finance in a Federal State, United Kingdom, Cambridge University Press.
- Wibowo, K., Dendi, A. & Zulhanif. (2001). Is a Specific Grant Really ”Specific”? : Case of Indonesian Provinces, 2003 – 2010. No 201109, Working Papers in Economics and Development Studies (WoPEDS) from Department of Economics, Padjadjaran University.
- Widhiyanto, I. (2008). Fiscal Desentralization and Indonesia Regional Income Disparity (1994-2004). *Jurnal Keuangan Publik*, Vol. 5 (1), 19 – 53.
- Wodon, Q. & Yitzhaki, S. (2002). Inequality and Social Welfare. *Poverty Reduction Strategies*, Vol. 1 (4), 75-104.
- Xie, D. et.al., (1999). Fiscal Decentralization and Economic Growth in the United States. *Journal of Urban Economics*, Vol. 45 (2), 228 – 239.
- Yeeles, A. (2015). Intergovernmental Fiscal Transfers and Geographical Disparities in Local Government Income in the Philippines. *Journal of Southeast Asian Economic (JSEAE)*, Vol. 32 (3), 390 - 401.
- Yusuf, A. A., Andrew, S. & Irlan A. R (2013). Long-Run Evolution of Inequality in Indonesia, (WoPEDS) 2013XX, Fakultas Ekonomi, Universitas Padjadjaran. Bandung.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Artikel Pertama Dengan Status Submit

Ekuitas Stiesia <ekuitas@stiesia.ac.id>

To: amier archam

22 Jan at 9:17 AM

Kepada YTh : Bpk Muhammad Amier,

Silahkan memasukkan via OJS kami di <https://ejournal.stiesia.ac.id/>. Kemudian silahkan daftar, kemudian login menggunakan username dan password yang sudah di daftarkan. Kemudian ikuti langkah-langkah yang sudah disediakan.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Redaksi Jurnal EKUITAS

Siti Rokhmi Fuadati <ekuitas@stiesia.ac.id>

To: amier Muhammad Amir Arham

19 Jan at 1:10 PM

amier Muhammad Amir Arham:

Terima kasih untuk menyerahkan manuskrip, "TRANSFER DANA DESA DAN KEMISKINAN PEDESAAN DI INDONESIA" untuk EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan). Dengan sistem manajemen jurnal online yang kami gunakan, Anda akan bisa melacak kemajuan naskah dalam proses editorial dengan login ke web site jurnal:

URL Manuskrip: <https://ejournal.stiesia.ac.id/ekuitas/author/submission/3665>

Nama pengguna Penulis: amier_archam

Jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan hubungi saya. Terima kasih untuk mempertimbangkan jurnal ini sebagai tempat untuk karya Anda.

Siti Rokhmi Fuadati

EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)

=====

EKUITAS

<https://ejournal.stiesia.ac.id/ekuitas>

Penyerahan Aktif

- [Aktif](#)
- [Arsip](#)

<u>ID</u>	<u>MM-DD</u> <u>Pengajuan</u>	<u>Bagian</u>	<u>Penulis</u>	<u>Judul</u>	<u>Status</u>
3669	01-24		Arham	TANSFER DANA DESA DAN KEMISKINAN PEDESAAN DI INDONESIA	Menunggu Penugasan

Lampiran 2: Artikel Kedua Dengan Status Submit (verifikasi)

Daisy Mojares <daisy.mojares@dlsu.edu.ph>

To: amier archam

Cc: Tereso S. Tullao Jr., Marites Tiongco

24 Jun at 11:57 AM

Dear Amir Arham,

This is to acknowledge that we have received your article "VILLAGE FUND TRANSFER AND INEQUALITY OF INCOME DISTRIBUTION: AN EMPIRICAL STUDY IN 33 PROVINCES IN INDONESIA".

We are now in the process of verifying your submission if it is complete, readable, and appropriate for the DLSU Business and Economics Review. Your document will first be submitted to a plagiarism detector tool so please make sure that all your sources are identified and indicated in your list of references. We will inform you via email if your submission is appropriate for this journal and merits having experts to review it.

Please make sure to identify all your sources and correctly indicate all literature references in your text. Your document will be submitted to a plagiarism detection service.

May I also suggest that you look carefully at related articles that we have published in recent years, and emulate their approaches to provide continuous intellectual discussion on potentially generalizable results in your paper. You may want to check this link: <http://ejournals.ph/issue.php?id=843#prod> for a list of DLSU Business and Economics Review publications related to your topic.

If you have questions about your submission, you may contact me. Please expect a one week delay in my response to your queries.

Thank you very much for your interest in contributing to our journal.

Daisy Mojares
Editorial Assistant
DLSU Business and Economics Review

Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test

Pool: INEQUALITY

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq.	Chi-Sq. d.f.	Prob.
	Statistic		
Cross-section random	0.000000	6	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
GROWTH?	-0.000031	0.001088	0.000008	0.6954
LOG(POP?)	0.364846	0.004404	0.665045	0.6585
POVERTY?	-0.001778	0.003930	0.000061	0.4633
HDI?	0.028030	0.000907	0.001149	0.4235
UNEMP?	0.002595	-0.001875	0.000011	0.1855
LOG(DD?)	-0.030651	-0.006826	0.001222	0.4956

Multikolinearitas Growth

Dependent Variable: GROWTH?

Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)

Date: 09/23/17 Time: 15:26

Sample: 2015 2016

Included observations: 2

Cross-sections included: 33

Total pool (balanced) observations: 66

Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	21.08185	9.716137	2.169777	0.0340
LOG(POP?)	0.263251	0.423682	0.621341	0.5367
POVERTY?	-0.014197	0.057747	-0.245847	0.8066
HDI?	-0.218824	0.116788	-1.873685	0.0658
UNEMP?	-0.358843	0.138236	-2.595876	0.0118
LOG(DD?)	-0.129986	0.305893	-0.424940	0.6724
Fixed Effects				
(Cross)				
_ACEH--C	-2.103963			
_BABEL--C	-1.256533			
_BALI--C	0.378722			
_BANTEN--C	1.276577			
_BENGKULU--C	-0.223693			
_GORONTALO--C	0.241935			
_JABAR--C	0.909862			
_JAMBI--C	-1.226910			
_JATENG--C	-0.199354			
_JATIM--C	-0.330886			
_JOGJA--C	0.823548			
_KALBAR--C	-1.089355			
_KALSEL--C	-1.199076			
_KALTARA--C	-1.328013			
_KALTENG--C	1.046328			
_KALTIM--C	-3.671062			
_KEPRI--C	1.637653			
_LAMPUNG--C	-0.659700			
_MALUKU--C	1.263246			
_MALUKUTARA--C				
C	0.153679			
_NTB--C	-0.450250			
_NTT--C	-1.644954			
_PAPBAR--C	-0.753127			
_PAPUA--C	0.510284			

_RIAU--C	-2.609139		
_SULBAR--C	-0.316756		
_SULSEL--C	1.780880		
_SULTENG--C	5.904956		
_SULTRA--C	1.419719		
_SULUT--C	1.947296		
_SUMBAR--C	0.414659		
_SUMSEL--C	-0.818576		
_SUMUT--C	0.172001		
Effects Specification			
		S.D.	Rho
Cross-section random		1.913737	0.8014
Idiosyncratic random		0.952583	0.1986
Weighted Statistics			
R-squared	0.164687	Mean dependent var	1.756409
Adjusted R-squared	0.095078	S.D. dependent var	1.001823
S.E. of regression	0.953008	Sum squared resid	54.49348
F-statistic	2.365871	Durbin-Watson stat	2.094744
Prob(F-statistic)	0.050199		
Unweighted Statistics			
R-squared	0.258928	Mean dependent var	5.290303
Sum squared resid	257.0334	Durbin-Watson stat	0.444105

Multiko Populasi

Dependent Variable: LOG(POP?)

Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)

Date: 09/23/17 Time: 15:28

Sample: 2015 2016

Included observations: 2

Cross-sections included: 33

Total pool (balanced) observations: 66

Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	15.44523	0.392265	39.37452	0.0000
GROWTH?	0.000538	0.000814	0.660736	0.5113
POVERTY?	0.001781	0.001730	1.029496	0.3074
HDI?	-0.013008	0.006885	-1.889352	0.0637
UNEMP?	0.000671	0.000946	0.708912	0.4811
LOG(DD?)	0.031033	0.004979	6.233366	0.0000
Fixed Effects				
(Cross)				
_ACEH--C	0.183458			
_BABEL--C	-1.000499			
_BALI--C	0.136978			
_BANTEN--C	1.135034			
_BENGKULU--C	-0.756332			
_GORONTALO--C	-1.288919			
_JABAR--C	2.429323			
_JAMBI--C	-0.140495			
_JATENG--C	2.087527			
_JATIM--C	2.220441			
_JOGJA--C	0.067793			
_KALBAR--C	0.139785			
_KALSEL--C	0.006843			
_KALTARA--C	-1.772558			
_KALTENG--C	-0.453869			
_KALTIM--C	-0.054275			
_KEPRI--C	-0.578034			
_LAMPUNG--C	0.668175			
_MALUKU--C	-0.900841			
_MALUKUTARA--C				
C	-1.244441			
_NTB--C	0.153010			
_NTT--C	0.129650			
_PAPBAR--C	-1.655084			
_PAPUA--C	-0.464280			

_RIAU--C	0.501095		
_SULBAR--C	-1.175601		
_SULSEL--C	0.749392		
_SULTENG--C	-0.362992		
_SULTRA--C	-0.474119		
_SULUT--C	-0.480520		
_SUMBAR--C	0.303969		
_SUMSEL--C	0.666241		
_SUMUT--C	1.224142		
Effects Specification			
		S.D.	Rho
Cross-section random		0.563741	0.9999
Idiosyncratic random		0.004140	0.0001
Weighted Statistics			
R-squared	0.673469	Mean dependent var	0.079008
Adjusted R-squared	0.646259	S.D. dependent var	0.010470
S.E. of regression	0.006227	Sum squared resid	0.002327
F-statistic	24.75000	Durbin-Watson stat	0.812540
Prob(F-statistic)	0.000000		
Unweighted Statistics			
R-squared	0.007710	Mean dependent var	15.21524
Sum squared resid	68.22900	Durbin-Watson stat	2.77E-05

Multiko Poverty

Dependent Variable: POVERTY?

Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)

Date: 09/23/17 Time: 15:29

Sample: 2015 2016

Included observations: 2

Cross-sections included: 33

Total pool (balanced) observations: 66

Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	88.51828	21.31094	4.153654	0.0001
GROWTH?	-0.160125	0.079538	-2.013187	0.0486
LOG(POP?)	-0.902367	1.126445	-0.801076	0.4262
HDI?	-1.049183	0.268115	-3.913182	0.0002
UNEMP?	-0.012411	0.095083	-0.130533	0.8966
LOG(DD?)	0.608570	0.245008	2.483876	0.0158
Fixed Effects				
(Cross)				
_ACEH--C	4.865814			
_BABEL--C	-6.527402			
_BALI--C	-2.692613			
_BANTEN--C	-3.741970			
_BENGKULU--C	2.584075			
_GORONTALO--C	6.864893			
_JABAR--C	0.121981			
_JAMBI--C	-6.237636			
_JATENG--C	2.731417			
_JATIM--C	3.430387			
_JOGJA--C	12.10308			
_KALBAR--C	-7.823838			
_KALSEL--C	-9.180233			
_KALTARA--C	-5.067209			
_KALTENG--C	-8.234212			
_KALTIM--C	1.201284			
_KEPRI--C	1.839590			
_LAMPUNG--C	-0.145319			
_MALUKU--C	10.62643			
_MALUKUTARA--C				
C	-9.948977			
_NTB--C	-2.043483			
_NTT--C	5.090199			
_PAPBAR--C	14.85163			
_PAPUA--C	10.94661			

_RIAU--C	-2.698975		
_SULBAR--C	-7.694927		
_SULSEL--C	0.169403		
_SULTENG--C	0.250108		
_SULTRA--C	1.672618		
_SULUT--C	-0.820531		
_SUMBAR--C	-4.041010		
_SUMSEL--C	-0.743142		
_SUMUT--C	-1.708046		
Effects Specification			
		S.D.	Rho
Cross-section random		6.449550	0.9955
Idiosyncratic random		0.431363	0.0045
Weighted Statistics			
R-squared	0.244629	Mean dependent var	0.675544
Adjusted R-squared	0.181681	S.D. dependent var	0.495671
S.E. of regression	0.448389	Sum squared resid	12.06315
F-statistic	3.886224	Durbin-Watson stat	2.061380
Prob(F-statistic)	0.004067		
Unweighted Statistics			
R-squared	0.391549	Mean dependent var	14.30015
Sum squared resid	2541.785	Durbin-Watson stat	0.009783

Multiko HDI

Dependent Variable: HDI?

Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)

Date: 09/23/17 Time: 15:30

Sample: 2015 2016

Included observations: 2

Cross-sections included: 33

Total pool (balanced) observations: 66

Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	53.67403	6.762208	7.937353	0.0000
GROWTH?	-0.038461	0.018906	-2.034275	0.0464
LOG(POP?)	0.221814	0.451418	0.491373	0.6250
POVERTY?	-0.089763	0.033742	-2.660262	0.0100
UNEMP?	-0.036364	0.021956	-1.656172	0.1029
LOG(DD?)	0.649879	0.041782	15.55396	0.0000
Fixed Effects				
(Cross)				
_ACEH--C	0.638658			
_BABEL--C	1.274227			
_BALI--C	4.594475			
_BANTEN--C	1.458967			
_BENGKULU--C	0.890374			
_GORONTALO--C	-0.752849			
_JABAR--C	-0.275913			
_JAMBI--C	0.133710			
_JATENG--C	-0.319569			
_JATIM--C	-0.661334			
_JOGJA--C	10.30084			
_KALBAR--C	-3.473847			
_KALSEL--C	-0.798395			
_KALTARA--C	1.157993			
_KALTENG--C	-0.294313			
_KALTIM--C	5.701110			
_KEPRI--C	6.263319			
_LAMPUNG--C	-1.652547			
_MALUKU--C	0.374172			
_MALUKUTARA--C				
C	-2.346329			
_NTB--C	-2.796000			
_NTT--C	-5.178191			
_PAPBAR--C	-4.142273			
_PAPUA--C	-9.525038			

_RIAU--C	1.815977		
_SULBAR--C	-4.572126		
_SULSEL--C	0.425598		
_SULTENG--C	-1.143659		
_SULTRA--C	0.640600		
_SULUT--C	2.183207		
_SUMBAR--C	1.502883		
_SUMSEL--C	-1.286163		
_SUMUT--C	-0.137567		
Effects Specification			
		S.D.	Rho
Cross-section random		2.611414	0.9986
Idiosyncratic random		0.099489	0.0014
Weighted Statistics			
R-squared	0.848570	Mean dependent var	1.846067
Adjusted R-squared	0.835950	S.D. dependent var	0.319359
S.E. of regression	0.129350	Sum squared resid	1.003887
F-statistic	67.24437	Durbin-Watson stat	1.607785
Prob(F-statistic)	0.000000		
Unweighted Statistics			
R-squared	0.120786	Mean dependent var	68.55212
Sum squared resid	811.4439	Durbin-Watson stat	0.001989

Multiko Unemployment

Dependent Variable: UNEMP?

Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)

Date: 09/23/17 Time: 15:30

Sample: 2015 2016

Included observations: 2

Cross-sections included: 33

Total pool (balanced) observations: 66

Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	13.49162	8.527886	1.582059	0.1189
GROWTH?	-0.281244	0.105463	-2.666761	0.0098
LOG(POP?)	0.991296	0.344447	2.877934	0.0055
POVERTY?	0.056669	0.049271	1.150156	0.2546
HDI?	-0.038098	0.103422	-0.368378	0.7139
LOG(DD?)	-0.977474	0.233782	-4.181139	0.0001
Fixed Effects				
(Cross)				
_ACEH--C	2.727637			
_BABEL--C	-1.213412			
_BALI--C	-3.081072			
_BANTEN--C	2.660865			
_BENGKULU--C	-0.823545			
_GORONTALO--C	-1.515112			
_JABAR--C	2.142784			
_JAMBI--C	-0.990691			
_JATENG--C	-0.986345			
_JATIM--C	-1.562435			
_JOGJA--C	-2.643931			
_KALBAR--C	-0.544521			
_KALSEL--C	0.065019			
_KALTARA--C	0.333323			
_KALTENG--C	0.450302			
_KALTIM--C	0.526043			
_KEPRI--C	0.924318			
_LAMPUNG--C	-0.849844			
_MALUKU--C	2.630917			
_MALUKUTARA--C				
C	0.799139			
_NTB--C	-1.061245			
_NTT--C	-2.144760			
_PAPBAR--C	1.822136			
_PAPUA--C	-1.068681			

_RIAU--C	0.878806		
_SULBAR--C	-1.454384		
_SULSEL--C	0.214128		
_SULTENG--C	0.627695		
_SULTRA--C	-0.235322		
_SULUT--C	2.739843		
_SUMBAR--C	0.246918		
_SUMSEL--C	-0.483707		
_SUMUT--C	0.869134		
Effects Specification			
		S.D.	Rho
Cross-section random		1.648798	0.8012
Idiosyncratic random		0.821321	0.1988
Weighted Statistics			
R-squared	0.310149	Mean dependent var	1.810232
Adjusted R-squared	0.252662	S.D. dependent var	0.976111
S.E. of regression	0.843836	Sum squared resid	42.72350
F-statistic	5.395071	Durbin-Watson stat	1.941004
Prob(F-statistic)	0.000367		
Unweighted Statistics			
R-squared	0.182009	Mean dependent var	5.448788
Sum squared resid	214.9160	Durbin-Watson stat	0.385855

Multiko DD

Dependent Variable: LOG(DD?)

Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)

Date: 09/23/17 Time: 15:32

Sample: 2015 2016

Included observations: 2

Cross-sections included: 33

Total pool (balanced) observations: 66

Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-6.677161	2.024272	-3.298549	0.0016
GROWTH?	0.015324	0.016437	0.932278	0.3549
LOG(POP?)	0.726541	0.080758	8.996514	0.0000
POVERTY?	0.098463	0.011779	8.359426	0.0000
HDI?	0.231978	0.024177	9.595078	0.0000
UNEMP?	-0.270787	0.016018	-16.90533	0.0000
Fixed Effects				
(Cross)				
_ACEH--C	1.381509			
_BABEL--C	-0.490858			
_BALI--C	-2.092877			
_BANTEN--C	0.236184			
_BENGKULU--C	-0.347889			
_GORONTALO--C	-0.834859			
_JABAR--C	0.391549			
_JAMBI--C	0.158292			
_JATENG--C	-0.403381			
_JATIM--C	-0.639858			
_JOGJA--C	-3.969065			
_KALBAR--C	1.008309			
_KALSEL--C	0.931883			
_KALTARA--C	0.463491			
_KALTENG--C	0.783623			
_KALTIM--C	-0.689317			
_KEPRI--C	-1.573558			
_LAMPUNG--C	0.002355			
_MALUKU--C	0.241322			
_MALUKUTARA--C				
C	1.542043			
_NTB--C	-0.035570			
_NTT--C	0.144081			
_PAPBAR--C	1.023960			
_PAPUA--C	1.117010			

_RIAU--C	0.264843		
_SULBAR--C	0.651417		
_SULSEL--C	-0.265652		
_SULTENG--C	0.033232		
_SULTRA--C	-0.147392		
_SULUT--C	0.635481		
_SUMBAR--C	-0.299415		
_SUMSEL--C	0.202123		
_SUMUT--C	0.576985		
Effects Specification			
		S.D.	Rho
Cross-section random		0.455644	0.9579
Idiosyncratic random		0.095505	0.0421
Weighted Statistics			
R-squared	0.491672	Mean dependent var	2.975266
Adjusted R-squared	0.449311	S.D. dependent var	0.430160
S.E. of regression	0.319215	Sum squared resid	6.113885
F-statistic	11.60678	Durbin-Watson stat	2.862159
Prob(F-statistic)	0.000000		
Unweighted Statistics			
R-squared	-0.306637	Mean dependent var	20.29357
Sum squared resid	79.25024	Durbin-Watson stat	0.220806

Uji Autokorelasi dengan Durbin Watson

Dependent Variable: INEQ?
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)
Date: 09/23/17 Time: 15:37
Sample: 2015 2016
Included observations: 2
Cross-sections included: 33
Total pool (balanced) observations: 66

Weighted Statistics			
R-squared	0.358473	Mean dependent var	0.136751
Adjusted R-squared	0.293233	S.D. dependent var	0.020839
S.E. of regression	0.017519	Sum squared resid	0.018109
F-statistic	5.494682	Durbin-Watson stat	1.995344
Prob(F-statistic)	0.000143		
Unweighted Statistics			
R-squared	0.488817	Mean dependent var	0.313121
Sum squared resid	0.055454	Durbin-Watson stat	0.651602

Uji Heteroskedastisitas Menggunakan Metode Glejser

Dependent Variable: RESID?
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)
Date: 09/23/17 Time: 15:44
Sample: 2015 2016
Included observations: 2
Cross-sections included: 33
Total pool (balanced) observations: 66
Linear estimation after one-step weighting matrix

Weighted Statistics			
R-squared	-0.000000	Mean dependent var	5.53E-17
Adjusted R-squared	-0.101695	S.D. dependent var	0.016691
S.E. of regression	0.017519	Sum squared resid	0.018109
F-statistic	-1.88E-15	Durbin-Watson stat	1.995344
Prob(F-statistic)	1.000000		
Unweighted Statistics			
R-squared	-0.000000	Mean dependent var	1.27E-16
Sum squared resid	0.055454	Durbin-Watson stat	0.651602

